

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

EDISI
FEBRUARI
2019

<https://papua.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA

EDISI
FEBRUARI
2019



©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

INDIKATOR PENTING PROVINSI PAPUA
EDISI FEBRUARI 2019

ISSN : 2477-4472

Katalog BPS : 1103009.94

No. Publikasi : 94550.1911

Naskah : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Editor : Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Tata Letak : Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Kover : Bidang Integrasi Pengolahan Data dan Diseminasi Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Jayapura : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2019
viii + 52 halaman; 18,2 cm x 25,7 cm (B5 JIS)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

HEADLINE

01

INFLASI

Januari 2019



Kota Jayapura
0,26 %
IHK 140,95

Merauke
-0,01 %
IHK 141,00



EKSPOR IMPOR

(Juta US\$)

Januari 2019

Ekspor 144,80
Impor 26,41
Neraca Perdagangan 118,39

02

03

ANGKUTAN LAUT

Desember 2018



Penumpang(org) Berangkat 28.151
Datang 15.345

Barang(ton) Muat 17.836
Bongkar 133.304



NILAI TUKAR PETANI

Januari 2019

NTP 90,37
Inflasi Pedesaan 0,71 %

04

05

INDUSTRI

Triwulan IV-2018



IBS -11,63 %
IMK 6,27 %

PERTUMBUHAN EKONOMI

Triwulan IV-2018



TW IV-2018 -15,66 %
Tahun 2018 7,33 %

06

INDEKS TENDENSI KONSUMEN

Triwulan IV-2018



119,51

07

PRAKATA

Indikator Penting Provinsi Papua ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. Data dan informasi yang dimuat merupakan perkembangan data terbaru yang dihimpun dan dirilis BPS, yang merupakan hasil pendataan langsung dan hasil kompilasi produk administrasi pemerintah yang dilakukan secara teratur (bulanan, triwulanan dan tahunan) oleh jajaran BPS di seluruh Provinsi Papua.

Publikasi ini dimaksudkan untuk melengkapi bahan penyusunan kebijakan dan evaluasi kemajuan yang dicapai baik di bidang sosial maupun bidang ekonomi. Indikator Penting Provinsi Papua ini mencakup antara lain: perkembangan bulanan Inflasi, Transportasi, Nilai Tukar Petani (NTP), Inflasi Pedesaan, Ekspor-Import, Industri manufaktur, Pertumbuhan Ekonomi, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan, IKK, IPM, serta Produksi Tanaman Pangan. Data yang lebih luas dan spesifik untuk sektor tertentu, tersedia dalam publikasi BPS lainnya atau dapat diperoleh melalui website <http://papua.bps.go.id>. Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh penggunanya.

Jayapura, Februari 2019
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA,

Drs. SIMON SAPARY, M.Sc



DAFTAR ISI

- iv _____ *Headline*
- vi _____ *Prakata*
- viii _____ *Daftar Isi*

Sosial dan Kependudukan

- 3 _____ *Penduduk*
- 6 _____ *Kemiskinan*
- 9 _____ *Ketenagakerjaan*
- 11 _____ *Indeks Pembangunan Manusia*
- 14 _____ *Indeks Kebahagiaan*
- 16 _____ *Potensi Desa (PODES)*

Ekonomi dan Perdagangan

- 20 _____ *Inflasi (update)*
- 22 _____ *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (update)*
- 25 _____ *Ekspor (update)*
- 27 _____ *Impor (update)*
- 29 _____ *Nilai Tukar Petani (NTP) (update)*
- 31 _____ *Angkutan Laut (update)*
- 33 _____ *Industri Manufaktur (update)*
- 35 _____ *Indeks Tendeksi Konsumen (ITK) (update)*

Pertanian

- 39 _____ *Pertanian*

Indikator Lainnya

- 41 _____ *Informasi Lainnya (update)*



**SOSIAL
DAN
KEPENDUDUKAN**

<https://papua.bps.go.id>

PENDUDUK



Tahukah anda??

“Jumlah penduduk Papua tahun 209 mencapai 3.379.302 jiwa”

Awalnya, penduduk dipandang hanya sebagai input atau alat dalam pembangunan, bukan sebagai sasaran pembangunan. Saat itu fokus pembangunan antara lain hanya pada modal, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi.

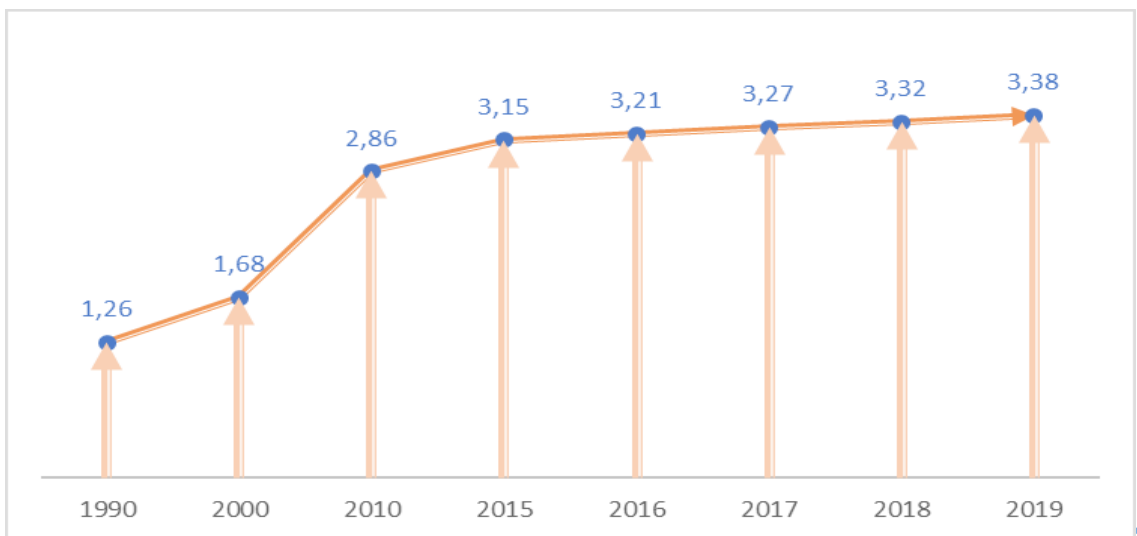
Di tahun 1990, setelah beberapa dekade pembangunan berlalu, ditemukan fakta bahwa kenaikan pendapatan nasional belum tentu dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup penduduknya. Sejak saat itu, menjadi jelas bahwa selain sebagai alat pembangunan, penduduk juga merupakan sasaran pembangunan.

Oleh karena itulah fokus pembangunan berpindah dari kebijakan yang terfokus pada pendapatan nasional menjadi kebijakan yang terpusat pada pembangunan manusia (Harry Seldadyo, UNDP).

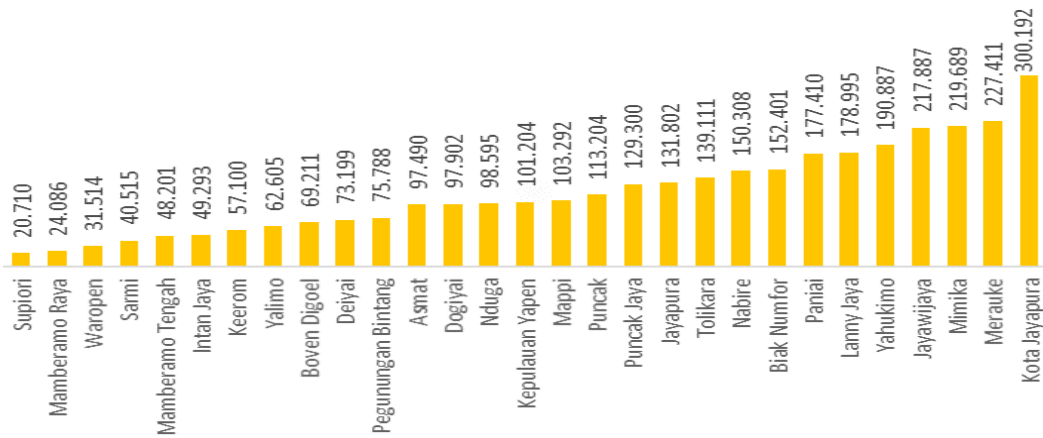
Hasil proyeksi penduduk berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (SP2010) menunjukkan bahwa di tahun 2019, jumlah penduduk Papua mencapai 3.379.302 jiwa. Jumlah tersebut meningkat 1,76 persen dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2018.

Menurut penyebarannya, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Jayapura yang mencapai 300.192 jiwa, sementara yang paling sedikit adalah Kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk 20.710 jiwa.

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Provinsi Papua, 1990, 2000, 2010, 2015–2019 (juta orang)



Gambar 2. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2019 (orang)



Dengan luas wilayah mencapai 316.553,07 km², kepadatan penduduk di Provinsi Papua hanya 10 jiwa/km². Disparitas kepadatan penduduk antar kabupaten/kota sangat tinggi. Kepadatan penduduk paling tinggi terjadi di Kota Jayapura sebagai ibukota Provinsi Papua yang mencapai 303-304 jiwa/km²; sedangkan yang terendah adalah di Mamberamo Raya yang hanya sekitar 8 jiwa per km².

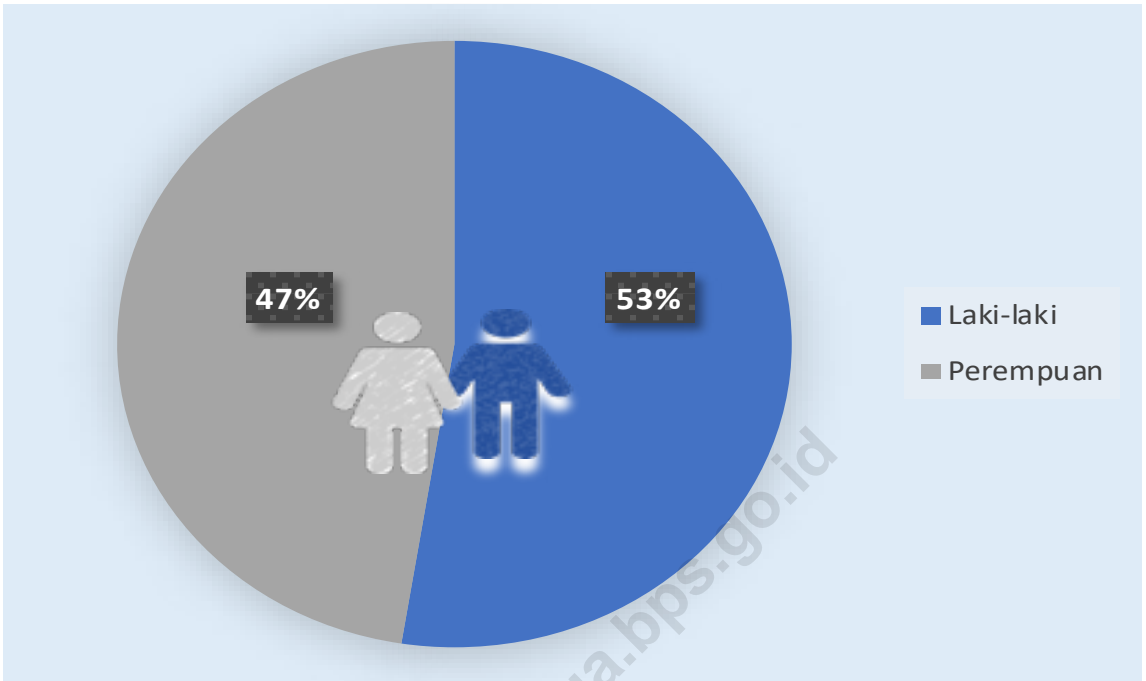
Untuk melihat perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu wilayah dapat digunakan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin di Provinsi Papua tahun 2019 sebesar 110,60. Ini berarti untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 110 hingga 111 penduduk laki-laki.

Menurut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umurnya, sebagian besar penduduk Papua berada dalam kelompok umur muda. Hal ini ditunjukkan dari bentuk piramida penduduk Papua yang termasuk dalam kategori ekspansif (piramida penduduk muda) yang mengindikasikan cukup tingginya tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk di Papua.

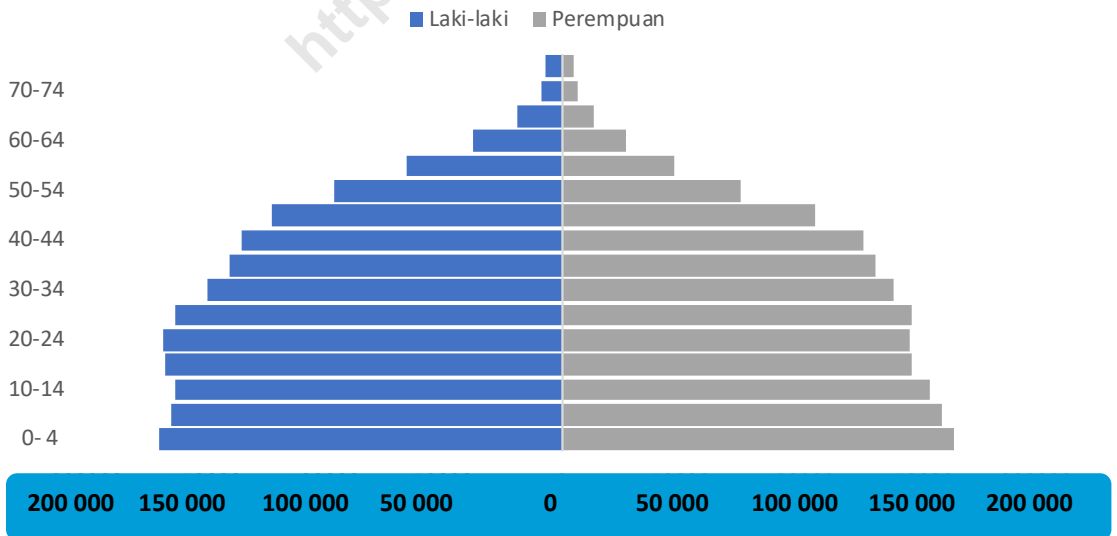
Dasar piramida yang cukup lebar menunjukkan relatif besarnya rasio ketergantungan penduduk muda, sementara puncak piramida yang menciut tajam menunjukkan rendahnya rasio ketergantungan penduduk tua. Rasio ketergantungan menunjukkan beban atau banyaknya penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) yang harus ditanggung secara ekonomi oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun).

Secara umum, rasio ketergantungan di Papua tahun 2019 sebesar 44,32 yang berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 45 penduduk usia nonproduktif. Selama hampir dua dekade terakhir (1999-2018) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin menurun secara signifikan sebesar 27,32 persen poin dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,43 pada September 2018.

Gambar 3. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Papua, 2019 (orang)



Gambar 4. Piramida Penduduk Provinsi Papua, 2019 (orang)



KEMISKINAN



Tahukah anda??

“Persentase penduduk miskin Provinsi pada September 2018 turun menjadi 27,43 persen, terendah dalam kurun waktu dua dekade terakhir”

Selama hampir dua dekade terakhir (1999-2018) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat persentase penduduk miskin menurun secara signifikan sebesar 27,32 persen poin dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 27,43 pada September 2018.

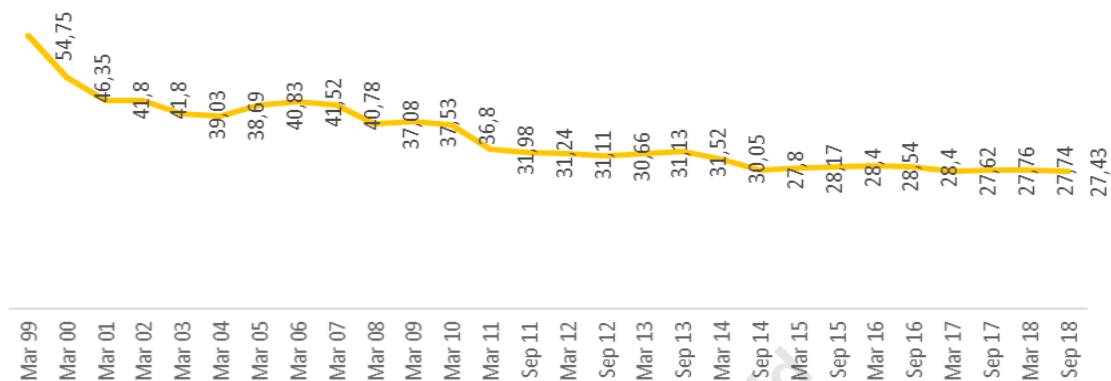
Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) menurun 4,72 persen. Penurunan persentase penduduk miskin terbesar terjadi pada periode Maret 2010 - Maret 2011 di mana terdapat 4,82 persen penduduk yang pada tahun 2010 penghasilannya di bawah garis kemiskinan kini bergeser di atas garis kemiskinan sehingga menjadi tidak miskin.

Selama enam bulan terakhir persentase penduduk miskin Papua mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dibandingkan Maret 2018 yaitu dari 27,74 persen menjadi 27,43 persen.

Menurut tipe daerahnya, penduduk miskin terkonsentrasi di daerah perdesaan, di mana pada September 2018 terdapat 36,65 persen penduduk miskin tinggal di perdesaan, sedangkan di perkotaan hanya sebesar 4,01 persen.

Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Maret 2018), terdapat kenaikan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan sebesar 0,02 persen. Sedangkan untuk daerah perkotaan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,50 persen poin.

Gambar 5. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua, Maret 1999 – September 2018 (persen)



Data Susenas September 2018 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di tiga provinsi di Kawasan Timur Indonesia yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur memiliki persentase penduduk miskin terbesar berturut-turut 27,43 persen; 22,66 persen; dan 21,03 persen. Dari 34 provinsi, 27 provinsi diantaranya mengalami penurunan persentase penduduk miskin, dengan penurunan terbesar terjadi di Provinsi Gorontalo yang mencapai 0,98 persen.

Seiring dengan kenaikan harga (inflasi) yang terjadi dari tahun ke tahun, besarnya GK juga mengalami peningkatan. Garis Kemiskinan di Provinsi Papua September 2018 adalah Rp 518.811,-. Selama Maret 2018-September 2018 terjadi kenaikan GK yaitu mencapai Rp 19.348 atau sebesar 3,87 persen.

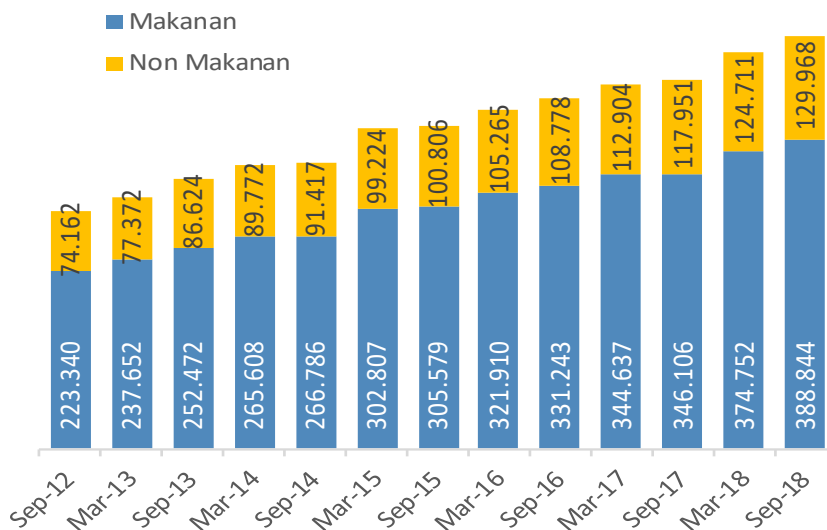
Menurut tipe daerahnya, GK daerah perkotaan pada September 2018 sebesar Rp 566.903,- lebih tinggi dibanding GK perdesaan yang mencapai Rp 499.615,-. Artinya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (*basic needs*) untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada di perdesaan.

Jika dilihat pada periode Maret 2018-September 2018, indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Papua mengalami penurunan. Tercatat P1 turun 0,82 poin demikian juga untuk itu P2 turun sebesar 0,46 poin. Kondisi ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Papua semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 1. Garis Kemiskinan Menurut Daerah Provinsi Papua, 2012-September 2018 (rupiah)

Tahun	Garis Kemiskinan (Per Kapita Per Bulan)		
	Kota	Desa	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)
Sep-12	344 415	281 022	297 502
Mar-13	362 401	298 395	315 025
Sep-13	387 789	322 079	339 096
Mar-14	404 944	338 206	355 380
Sep-14	408 419	340 846	358 204
Mar-15	440 697	388 095	402 031
Sep-15	445 057	392 446	406 385
Mar-16	466 985	412 991	427 176
Sep-16	479 294	425 264	440 021
Mar-17	498 368	441 287	457 541
Sep-17	508 403	446 994	464 056
Mar-18	542 542	482 000	499 643
Sep-18	566 903	499 615	518 811

Gambar 6. Garis Kemiskinan Makanan dan Non Makanan Provinsi Papua, Maret 2012-September 2018 (rupiah)



KETENAGAKERJAAN



Tahukah anda??

“Nilai TPAK dan TPT Papua pada Agustus 2018 masing-masing sebesar 79,11 persen dan 3,20 persen”

Pada Agustus 2018, jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Papua menurun dibandingkan kondisi Februari 2018. Jumlah angkatan kerja mencapai 1,83 juta orang atau berkurang 15.523 orang dibandingkan Februari 2018.

Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 berkurang 20.461 orang dibandingkan Februari 2018. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Papua pada Agustus 2018 mengalami kenaikan sekitar 2,17 persen dibanding Agustus 2017. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Februari 2018 terjadi penurunan sebanyak 0,27 persen.

Jumlah pengangguran di Papua pada Agustus 2018 sebanyak 58.756 orang. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan Agustus 2017.

Jumlah pengangguran berkurang 5.014 orang dibandingkan dengan keadaan tahun lalu pada periode sama. Sejalan dengan hal tersebut, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 2,91 persen pada Februari 2018 menjadi 3,20 persen pada Agustus 2018.

Tabel 2. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Papua, Februari 2016 –Agustus 2018

Jenis Kegiatan Usaha	2016		2017		2018	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Penduduk 15+	2 213 048	2 245 462	2 268 851	2 291 111	2.332.383	2.320.862
Angkatan Kerja	1 743 160	1 722 162	1 753 858	1 762 841	1.851.486	1.835.963
Bekerja	1 691 432	1 664 485	1 684 389	1 699 071	1.797.668	1.777.207
Penganggur	51 728	57 677	69 469	63 770	53.818	58.756
Bukan Angkatan Kerja	469 888	523 300	514 993	528 270	480.897	498.899
Sekolah	177 257	195 635	188 297	181 879	193.332	176.043
Mengurus RT	248 425	268 585	274 816	278 056	243.493	256.249
Lainnya	44 206	59 080	51 880	68 335	44.072	52.607
TPAK (%)	78,77	76,70	77,30	76,94	79,38	79,11
TPT (%)	2,97	3,35	3,96	3,62	2,91	3,20

Angka pengangguran di Papua masih berada jauh dibawah angka pengangguran nasional sebesar 5,34 persen. TPT tertinggi di Papua berada pada tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang mencapai 8,23 persen.

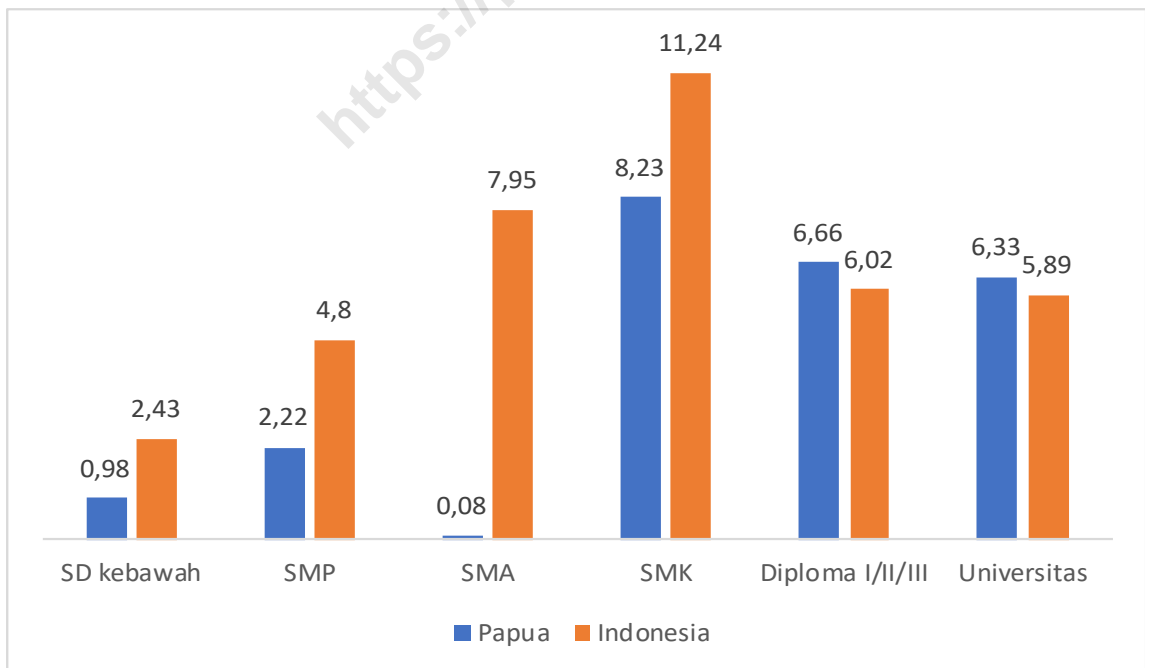
Penganggur dengan tingkat Pendidikan sekolah lainnya yang memiliki TPT diatas lima persen yakni penganggur dengan tingkat Pendidikan Diploma I/II/III (6,66 persen) dan universitas (6,33 persen).

Selain itu, tingkat pendidikan lainnya yang mempunyai TPT dibawah tiga persen yaitu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (2,22 persen) dan SD ke bawah (0,98 persen).

Pada Agustus 2018, TPT terkecil berada pada penganggur dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas sebesar 0,08 persen.

Struktur lapangan pekerjaan di Papua pada Agustus 2018 masih menunjukkan gambaran yang sama dengan periode sebelumnya. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Papua. Pada Agustus 2018, jumlah pekerja pada kategori ini mencapai 67,75 persen dari total tenaga kerja atau mencapai 1.204.116 orang.

Gambar 7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Provinsi Papua, Agustus 2018



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Tahukah anda??

“IPM Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 59,09, berada di peringkat ke 34 dari 34 Provinsi”



Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people's choice*). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan antara lain dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan backcasting sejak tahun 2010.

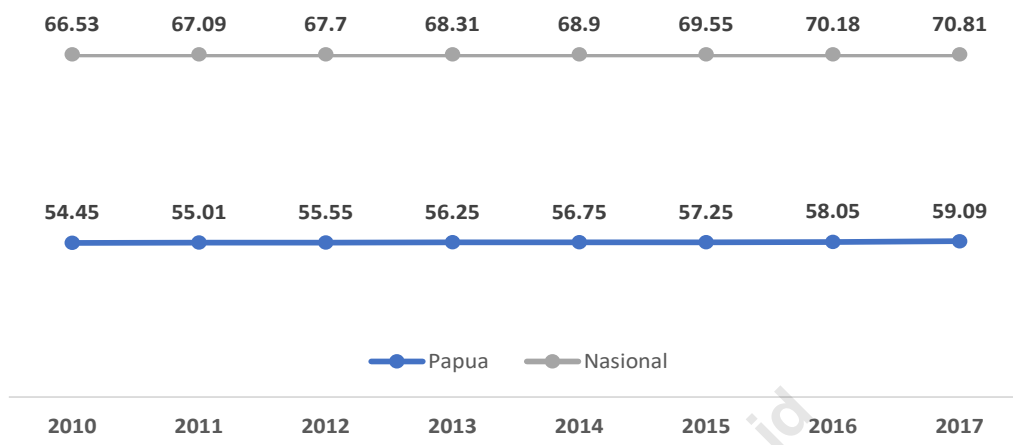
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan dengan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup

dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Dimensi pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Dimana Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal, dan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara itu, standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Secara umum, pembangunan manusia Papua terus mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2017. IPM Papua meningkat dari 54,45 pada tahun 2010 menjadi sebesar 59,09 di tahun 2017. Selama periode tersebut, IPM di provinsi paling timur Indonesia ini rata-rata tumbuh sebesar 1,79 persen.

Gambar 8. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Nasional dan Papua Tahun 2010 – 2017



Dan selama tahun 2015-2016, Papua menjadi provinsi dengan kecepatan pertumbuhan IPM tertinggi se-Indonesia.

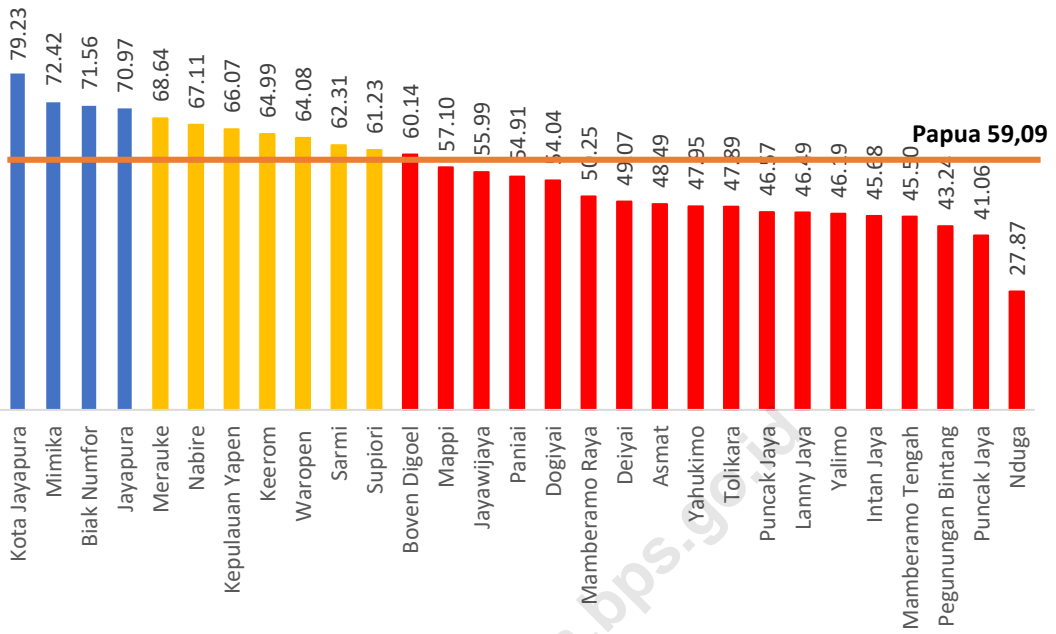
Meskipun demikian, dengan nilai IPM yang masih berada di bawah 60, pembangunan manusia Papua masih berstatus “rendah”. Pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Papua pada tahun 2017 cukup bervariasi. Mayoritas kabupaten di Papua masih memiliki status “rendah”. Kabupaten dengan IPM berstatus “sedang” adalah Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Keerom, Waropen, dan Supiori. Adapun kabupaten/kota dengan status IPM “tinggi” adalah Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Kota Jayapura.

Kabupaten Nduga merupakan kabupaten dengan IPM terendah di Papua yaitu sebesar 27,87. Sedangkan Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua tercatat memiliki pembangunan manusia tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Papua. Pada tahun 2017, IPM Kota Jayapura ini mencapai 79,23.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2016 hingga 2017, seluruh kabupaten/kota di Papua mengalami kenaikan IPM. Top movers IPM di Papua (kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat), yaitu: Kabupaten Nduga (4,93 persen), Pegunungan Bintang (3,20 persen), dan Mamberamo Tengah (3,06 persen).

Kemajuan pembangunan manusia di ketiga kabupaten tersebut didorong oleh peningkatan dimensi pendidikan. Salah satu program pendidikan yang dilakukan pemerintah adalah program SM3T (Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang bermanfaat bagi masyarakat karena sarjana terjun langsung untuk membantu proses kegiatan pendidikan di kabupaten.

Gambar 9. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua, 2017



INDEKS KEBAHAGIAAN



Tahukah anda??

“Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52.”

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua merupakan indeks komposit yang dihitung secara tertimbang menggunakan dimensi dan indikator dengan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan tingkat kehidupan penduduk yang semakin bahagia. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks maka semakin merasa tidak bahagia.

Metode pengukuran Indeks Kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan dari pengukuran sebelumnya pada tahun 2014 karena adanya penambahan cakupan indeks. Pada tahun 2014, Indeks Kebahagiaan hanya menggunakan Dimensi Kepuasan Hidup. Sedangkan pada tahun 2017, dalam indeks kebahagiaan ditambahkan Dimensi Perasaan (Affect) dan Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia). Perubahan lainnya yaitu pada tahun 2017, Dimensi Kepuasan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) subdimensi yaitu Subdimensi Kepuasan Hidup Personal dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 yang dihitung dengan menggunakan Metode 2014, lebih tinggi dibanding tahun 2014. Pada tahun 2017 sebesar 67,52 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 60,97.

Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 67,52. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun Indeks Kebahagiaan Provinsi Papua, yaitu: (1) Indeks Dimensi Kepuasan Hidup sebesar 68,42, dengan masing-masing Subdimensi Kepuasan Hidup Personal sebesar 63,04 dan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial sebesar 73,80; (2) Indeks Dimensi Perasaan (Affect) sebesar 68,42; dan (3) Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia) sebesar 69,98. Seluruh indeks diukur pada skala 0-100.

Berdasarkan indikator penyusunnya, indeks indikator tertinggi adalah Kepuasan terhadap Kondisi Keamanan yaitu sebesar 75,79 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Sosial. Sementara indeks indikator terendah adalah Pendidikan dan Keterampilan 53,54 yang merupakan Subdimensi Kepuasan Hidup Personal.

Tabel 3. Indeks Kebahagiaan dan Indeks Dimensi Menurut Karakteristik, 2017

Karakteristik	Indeks Kebahagiaan	Penyusun Indeks Kebahagiaan				
		Indeks Dimensi Kepuasan Hidup			Indeks Dimensi Perasaan (Affect)	Indeks Dimensi Makna Hidup (Eudaimonia)
		Indeks Subdimensi Kepuasan Hidup		Total		
		Personal	Sosial			
Klasifikasi Wilayah						
Perkotaan	73,51	71,86	78,09	74,97	68,03	77,02
Perdesaan	65,29	59,77	72,21	65,99	62,25	67,37
Jenis Kelamin						
Laki-Laki	66,67	61,86	73,17	67,51	63,13	69,06
Perempuan	70,36	67,04	75,92	71,48	66,13	73,10
Status Perkawinan						
Belum Menikah	69,04	65,68	73,39	69,54	65,26	72,00
Menikah	67,51	63,15	73,87	68,51	63,77	69,93
Cerai Hidup	66,22	62,65	75,25	68,95	57,60	71,33
Cerai Mati	67,37	61,08	72,86	66,97	65,15	69,82
Kelompok Umur						
≤ 24 Tahun	67,22	62,63	74,02	68,32	61,41	71,41
25-40 Tahun	67,06	62,60	73,03	67,82	63,49	69,55
41-64 Tahun	68,03	63,54	74,66	69,10	64,37	70,29
≥ 65 Tahun	67,61	63,13	72,82	67,97	62,86	71,58
Kedudukan Dalam Rumah Tangga:						
Kepala Rumah Tangga	66,77	61,84	73,23	67,53	63,23	69,24
Pasangan KRT	71,86	70,06	77,14	73,60	67,23	74,31
Banyaknya Anggota Rumah Tangga:						
1 Orang	67,42	63,14	70,61	66,88	66,01	69,27
2 Orang	66,99	62,11	72,03	67,07	64,87	68,86
3 Orang	66,13	62,76	72,95	67,85	61,46	68,65
4 Orang	67,40	63,11	73,95	68,53	63,32	69,97
5 Orang atau Lebih	68,83	63,56	75,43	69,49	65,16	71,50
Pendidikan Tertinggi						
Tidak pernah sekolah	63,49	56,63	70,98	63,80	61,68	64,83
Tidak tamat SD/ sederajat	65,95	62,55	73,93	68,24	60,15	68,93
SD sederajat	65,54	60,08	73,97	67,03	60,99	68,19
SMP sederajat	69,72	65,12	74,03	69,57	67,18	72,20
SMA sederajat	71,03	69,29	76,20	72,75	65,49	74,36
Diploma I, II, III	73,48	73,83	76,22	75,02	68,37	76,59
Diploma IV/S1	75,16	73,86	77,50	75,68	70,55	78,84
S2, S3	76,48	76,94	73,83	75,38	73,11	80,68
Pendapatan Rata						
Hingga Rp 1.800.000	62,39	56,29	70,23	63,26	58,03	65,50
Rp 1.800.001 - Rp 3.000.000	67,41	61,62	73,63	67,63	65,02	69,37
Rp 3.000.001 - Rp 4.800.000	70,56	68,19	77,31	72,75	65,30	73,13
Rp 4.800.001 - Rp 7.200.000	74,78	74,60	78,29	76,44	70,37	77,12
Lebih Dari Rp. 7.200.000	75,25	75,54	77,34	76,44	71,32	77,62
Papua	67,52	63,04	73,80	73,80	68,42	69,98

POTENSI DESA (PODES)



Tahukah anda??

“Data PODES 2018 mencatat, di Provinsi Papua terdapat 5.456 desa, 96 kelurahan, 576 kecamatan, dan 29 kabupaten/kota”

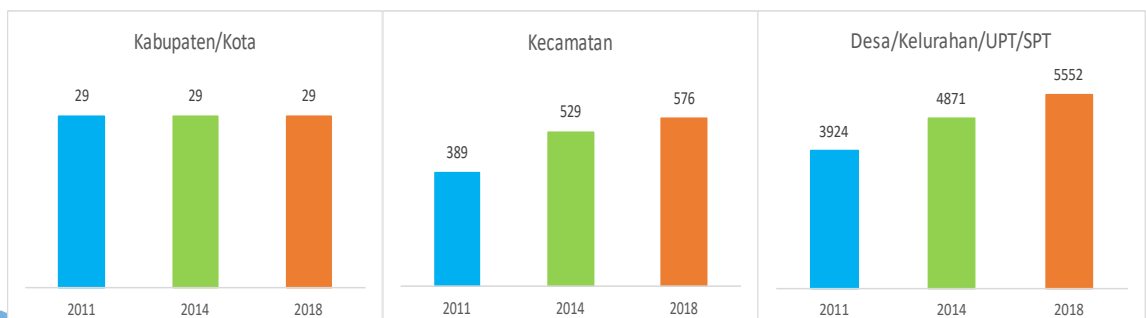
Podes 2018 dilaksanakan pada Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh Desa/ Kelurahan/Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/ Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT), Kecamatan, Kabupaten/Kota. Wilayah tersebut harus memenuhi tiga (3) syarat, yaitu: 1) ada wilayah 2) ada penduduk, dan 3) ada pemerintahan desa. Menurut Podes 2018, di Provinsi Papua terdapat 5.552 wilayah setingkat desa, 576 kecamatan, 29 kabupaten/kota. Dari sejumlah desa tersebut, terdiri atas 5.456 desa dan 96 kelurahan.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) adalah indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, Indeks Pembangunan Desa terdiri

dari lima (5) dimensi yaitu 1) Pelayanan Dasar, 2) Kondisi Infrastruktur, 3) Aksesibilitas/Transportasi, 4) Pelayanan Umum, dan 5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Tingkat perkembangan desa menurut IPD dikategorikan kedalam tiga (3) status yaitu: Desa Mandiri, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal. Semakin tinggi IPD menunjukkan semakin mandiri desa tersebut. Jumlah desa mandiri di Provinsi Papua sebanyak 10 desa (0,18 persen), 693 desa berkembang (12,70 persen), dan 4.753 desa tertinggal (87,12 persen). Rata-rata IPD Provinsi Papua untuk Dimensi Transportasi 56,96; Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 52,30; Dimensi Pelayanan Umum 41,67 persen; Dimensi Pelayanan Dasar 25,05; dan Dimensi Kondisi Infrastruktur 18,49.

Gambar 10. Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan/UPT/SPT Hasil PODES Provinsi Papua Tahun 2011, 2014 dan 2018



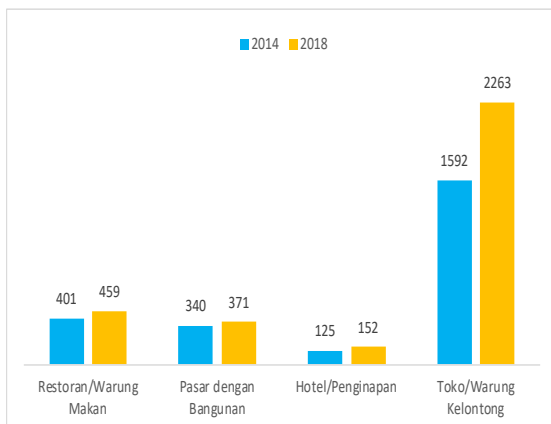
Pendataan Podes 2018 mengumpulkan beragam informasi. Salah satu potensi desa/kelurahan yang disajikan terkait bidang pariwisata yaitu potensi wisata di desa/kelurahan. Podes 2018 mencatat ada 40 desa wisata di Provinsi Papua, meningkat dari tahun 2014 yang hanya 17 desa wisata. Pada bidang ekonomi, peningkatan terjadi pada desa/kelurahan yang memiliki Industri Kecil dan Mikro. Peningkatan terbesar terjadi pada Industri Makanan dan Minuman sebesar 77 persen (menjadi 244 desa/kelurahan). Pada sarana ekonomi lainnya juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa/kelurahan dengan keberadaan warung/toko kelontong, pasar dengan bangunan (permanen dan semi permanen), hotel/penginapan, toko/warung kelontong.

Pada bidang kesehatan, desa dengan penyelenggaraan kegiatan posyandu sebulan sekali meningkat 18 persen dibandingkan tahun 2014 menjadi 2.012 desa/kelurahan. Desa/kelurahan dengan keberadaan puskesmas dan puskesmas

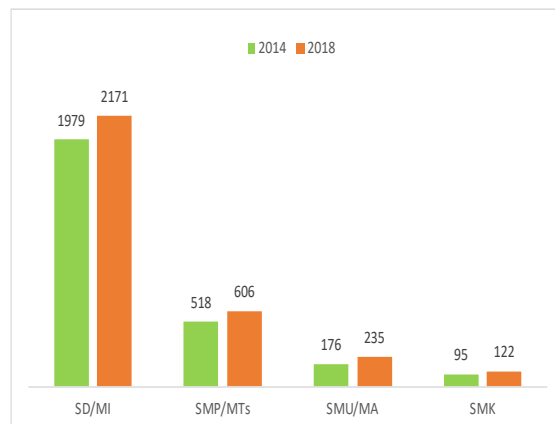
pembantu masing-masing meningkat 9 persen (menjadi 422 desa/kelurahan) dan 17 persen (menjadi 1.146 desa/kelurahan). Pada bidang perumahan dan lingkungan hidup ada beberapa peningkatan dibandingkan tahun 2014. Desa dengan/kelurahan dengan keberadaan pengguna listrik meningkat 39 persen (menjadi 4.050 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna sumber air bersih untuk minum meningkat 12 persen (menjadi 3.906 desa/kelurahan). Desa/kelurahan dengan keberadaan pengguna jamban sebagai fasilitas buang air besar meningkat sebesar 44 persen (menjadi 3.020 desa/kelurahan).

Pada bidang pendidikan, desa dengan keberadaan SD/MI sampai dengan SMU/MA dan SMK mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar terjadi pada keberadaan SMU/MA. Dari segi pendidikan kepala desa/lurah, ada 1.817 kepala desa/lurah berpendidikan minimal SMU/ sederajat (meningkat 33 persen dibandingkan tahun 2014).

Gambar 11. Perkembangan Sarana Sektor Ekonomi Provinsi Papua, 2014 dan 2018



Gambar 12. Perkembangan Sarana Sektor Pendidikan Provinsi Papua, 2014 dan 2018





**EKONOMI
DAN
PERDAGANGAN**

<https://papualps.go.id>

INFLASI



Tahukah anda??

“Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 0,26 persen dan Merauke mengalami deflasi sebesar 0,01 persen pada Januari 2019”

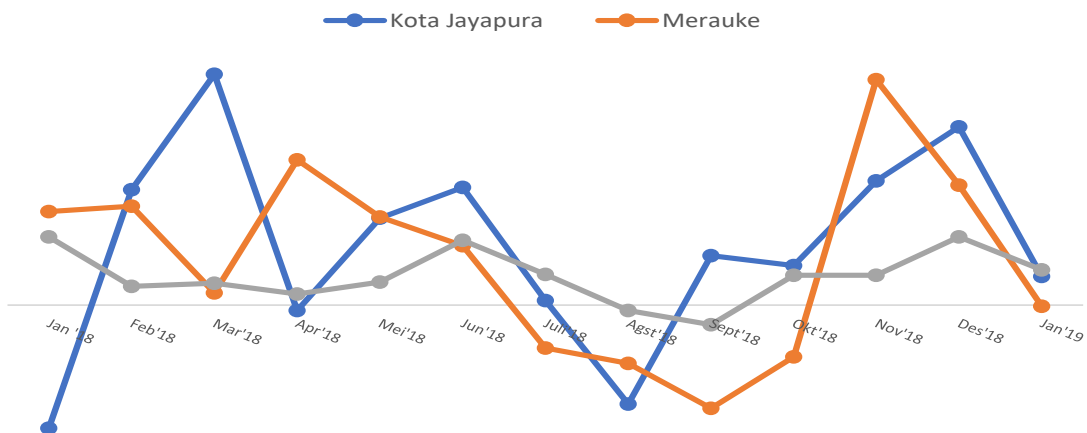
Pada Bulan Januari 2019 kedua kota IHK di Provinsi Papua mengalami perubahan angka indeks yang berbeda dimana Kota Jayapura mengalami inflasi sebesar 0,26 persen dan Merauke mengalami deflasi 0,01 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) masing-masing sebesar 140,95 dan 141,00.

Inflasi di Kota Jayapura terjadi karena adanya kenaikan angka indeks pada kelompok pengeluaran barang dan jasa yaitu; kelompok bahan makanan sebesar 0.76 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,12 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,51 persen; kelompok sandang sebesar 0,08 persen; kelompok pendidikan,

transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,03 persen dan kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen. Adapun kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok kesehatan sebesar -0,36 persen.

Komoditi yang mendorong inflasi dan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan antara lain: ikan ekor kuning, upah tukang bukan mandor, bawang merah, daging sapi, biaya pengiriman barang, telur ayam ras, tomat syaur, mobil, ikan cakalang asap dan lain-lain. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan harga antara lain: angkutan udara, bawang putih, cabai merah, bensin, daging ayam ras, bayam, cabai rawit, teri, sawi hijau, wortel dan lain-lain.

Gambar 13. Perkembangan Inflasi Kota Jayapura, Merauke & Nasional Januari 2018-Januari 2019



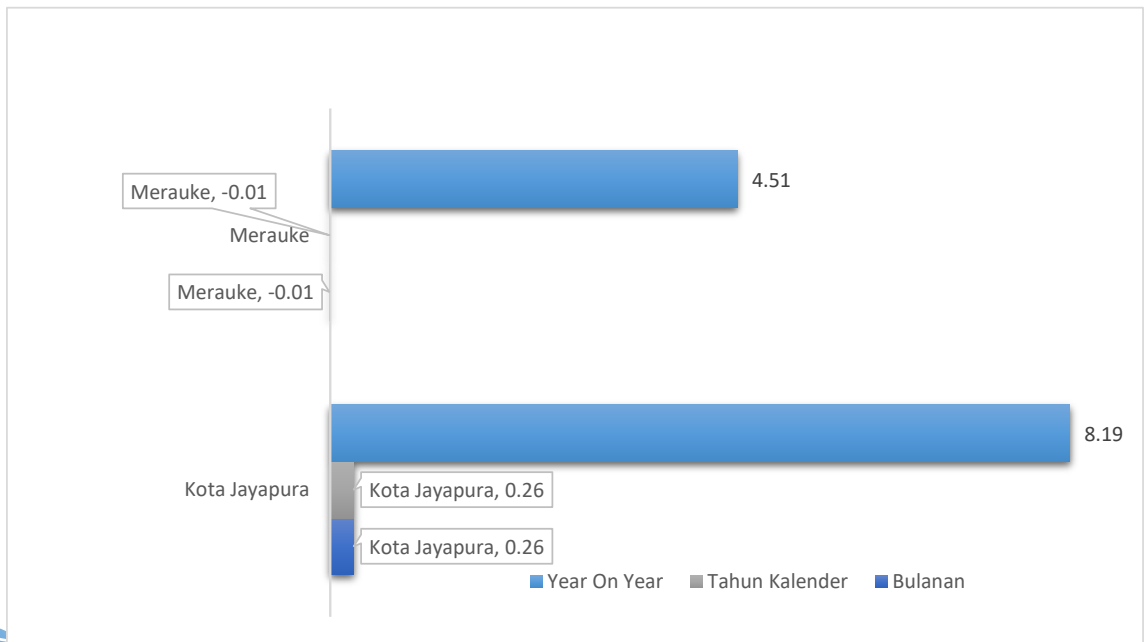
Deflasi di Merauke terjadi karena adanya penurunan angka indeks pada kelompok pengeluaran barang dan jasa yaitu kelompok bahan makanan sebesar 0,21 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,32 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -2,09 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yaitu kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 1,63 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,03 persen.

Terjadinya deflasi di Merauke didorong oleh adanya penurunan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditi antara lain: angkutan udara, cabai merah, daun singkong, terong panjang, buncis, daun kemangi, bayam, ikan paha, tahu mentah dan ikan mujair. Komoditi yang mengalami kenaikan harga antara lain: bawang merah, beras, kacang panjang, kubis, daging ayam ras, nasi dengan lauk, rokok kretek filter, kembang kol, tomat buah, kangkung dan lain-lain.

Dari 82 kota IHK tercatat 73 kota mengalami inflasi dan 9 kota yang mengalami deflasi. Kota Jayapura menempati urutan ke-51 tingkat nasional dan ke 11 tingkat Sulampua. Sedangkan Merauke menempati urutan ke-74 di tingkat nasional dan tingkat Sulampua di urutan ke-16.

Inflasi tahun kalender di Kota Jayapura pada bulan Januari 2019 sebesar 0,26 persen, dan laju inflasi year on year (Januari 2019 terhadap Januari 2018) sebesar 8,19 persen. Inflasi tahun kalender Merauke di bulan Januari 2019 sebesar -0,01 persen, dan laju inflasi year on year 2018 sebesar 4,51 persen.

Gambar 14. Laju Inflasi Bulanan, Tahun Kalender dan Year On Year di Kota Jayapura dan Merauke, Januari 2019 (%)



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)



Tahukah anda??

“Ekonomi Papua Triwulan Tahun 2018 tumbuh 7,33 persen.”

Perekonomian Papua berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp 210,659 triliun. Ekonomi Papua triwulan IV-2018 tumbuh -17,79 persen (y on y) dibandingkan triwulan III-2017. Selama Tahun 2018, perekonomian Papua tumbuh 7,33 persen meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh 4,64 persen.

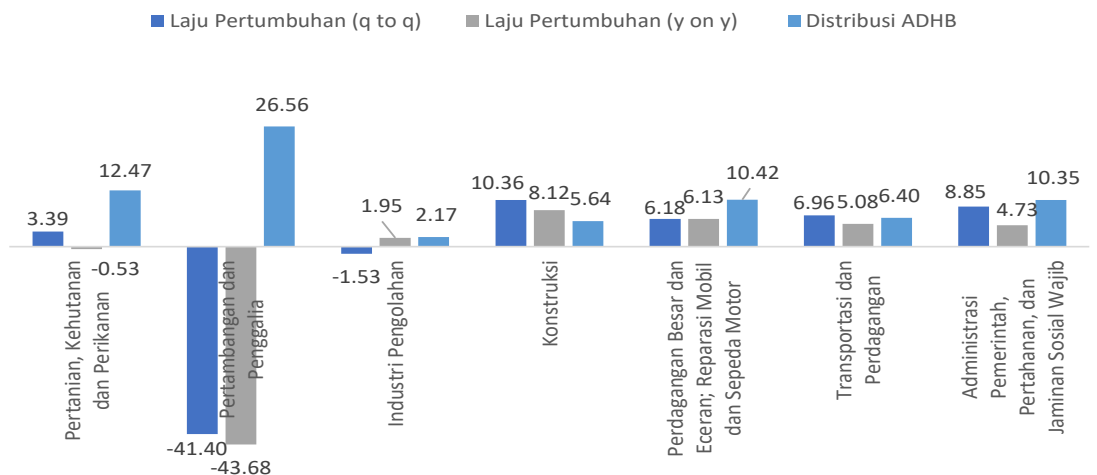
A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2018 (q to q) tumbuh negative yaitu -15,66 persen.

Pertumbuhan negative ini disebabkan oleh turunnya produksi bijih logam Papua selama triwulan IV-2018 sehingga Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian tumbuh negative -41,40 persen. Lapangan Usaha Industri Pengolahan tumbuh negative 1,53 persen.

Lapangan Usaha Konstruksi pertumbuhannya juga cukup tinggi sebesar 10,36 persen sementara lapangan usaha lainnya berada dibawah 10 persen. Sedangkan lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik, Air dan Gas sebesar 0,43 persen.

Gambar 15. Laju Pertumbuhan (q to q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB dengan Pertambangan dan Penggalian Beberapa Lapangan Usaha Triwulan IV-2018

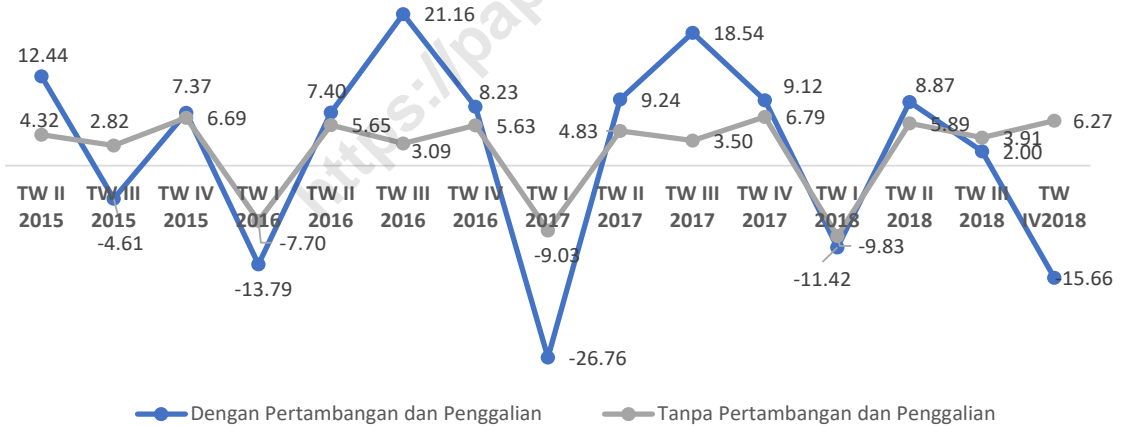


Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Papua triwulan IV-2018 (y on y) yang tumbuh negative -17,79 persen, -sebesar -20,38 persen berasal dari Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian; 0,84 persen dari Lapangan Usaha Konstruksi; -0,05 persen dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sementara 1,80 persen bersumber dari lapangan usaha lainnya.

Nilai PDRB per kapita Papua tahun 2018 sebesar Rp 63,40 juta atau naik 9,57 persen dibanding tahun lalu sebesar Rp 57,87 juta

Kenaikan ini sebagian besar dikarenakan pertumbuhan pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dan Konstruksi. Proporsi penduduk yang bekerja pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sangat kecil, maka jika ingin melihat gambaran secara umum lebih baik dengan tanpa Pertambangan dan Penggalian. Jika dilihat tanpa Pertambangan dan Penggalian, PDRB per kapita tahun 2018 sebesar Rp 40,12 juta, juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2017 yang senilai Rp 37,51 juta atau meningkat sebesar 6,98 persen.

Gambar 16. Pertumbuhan Ekonomi q-to-q Provinsi Papua, Triwulan II-2015 - Triwulan IV 2018





Tahukah anda??

“Komponen Ekspor Luar Negeri mendominasi struktur ekonomi Papua tahun 2018”

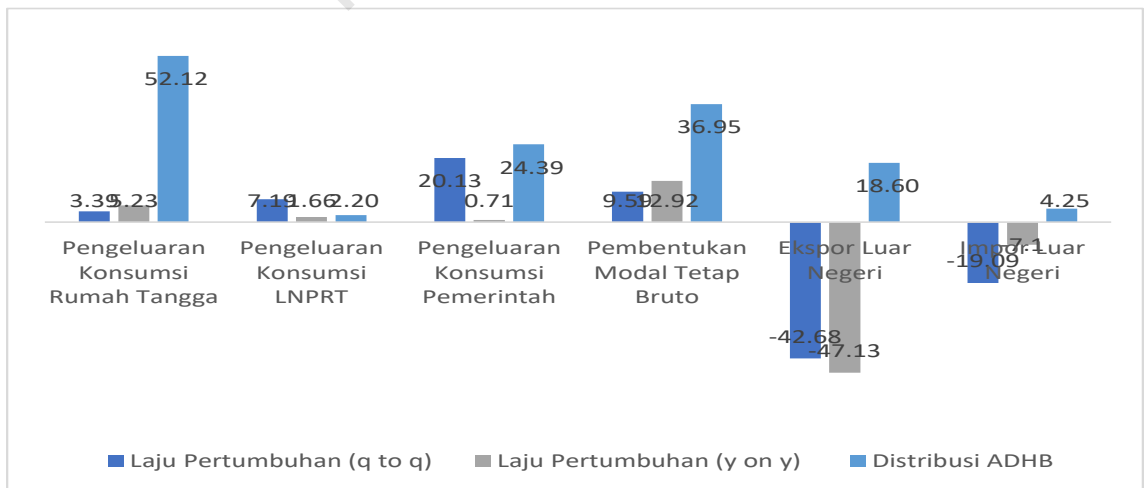
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2018 tumbuh 7,33 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 39,59 persen, diikuti Pengeluaran Impor Luar negeri yang tumbuh 8,43 persen. Sementara komponen PMTB menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 7,12 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 5,41 persen.

SStruktur PDRB Papua menurut Pengeluaran, komponen Konsumsi Rumah Tangga mendominasi sebesar 46,57 persen

diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,46 persen dan Ekspor Luar Negeri sebesar 26,50 persen.

Bila dilihat dari penciptaan PDRB maka sumber pertumbuhan ekonomi Papua tahun 2018 adalah komponen Ekspor Luar Negeri merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi yakni 6,39 persen, diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 2,31 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi dari komponen lainnya berada dibawah 2 persen.

Gambar 17. Laju Pertumbuhan (q-to-q) dan (y-on-y) serta Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Triwulan IV-2018 Provinsi Papua



EKSPOR

Tahukah anda??

“Total ekspor Papua pada Januari 2019 senilai US\$144,80 juta.”



A. Ekspor Migas dan Non Migas

Ekspor Papua pada Januari 2019 tercatat senilai US\$144,80 juta atau meningkat 62,77 persen dibanding ekspor bulan sebelumnya sebesar US\$88,96 juta. Ekspor Papua pada bulan ini berasal dari migas sebesar US\$3.341 dan barang nonmigas sebesar US\$144,80 juta. Ekspor terbesar berasal dari Pelabuhan Amamapare yaitu senilai US\$122,32 juta atau sebesar 84,48 persen dari total ekspor Papua. Dibandingkan tahun sebelumnya, total ekspor Papua lebih rendah 45,26 persen yaitu dari US\$264,52 juta pada Januari 2018 menjadi US\$144,80 juta pada Januari 2019.

B. Ekspor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Nilai ekspor golongan Biji-bijian & Konsentrat (HS26) tercatat senilai US\$122,32 juta atau meningkat 48,30 persen bila dibandingkan nilai ekspor bulan sebelumnya yang senilai US\$82,48 juta. Untuk golongan Kayu & Barang dari Kayu (HS44), nilai ekspornya sebesar US\$14,27 juta. Golongan Non Migas Lainnya memiliki nilai ekspor sebesar US\$8,20 juta. Adapun golongan Ikan dan Hewan Air Lainnya (HS03) tercatat adanya kegiatan ekspor sebesar US\$0,01 juta.

Tabel 4. Ringkasan Perkembangan Ekspor Provinsi Papua, Januari 2019

Uraian	Nilai FOB (Juta US\$)				% Perubahan Jan'19* thd Des'18	% Perubahan Jan'19* thd Jan'18	% Peran Thdp Total Ekspor Jan'19*
	Des 2018	Jan 2019*	Jan 2018	Jan 2019*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Ekspor	88,96	144,80	264,52	144,80	62,77	-45,26	100,00
Migas	0,00	0,00	0,00	0,00	508,11 ¹	313,96 ²	0,00
Non Migas	88,96	144,80	264,52	144,80	62,77	-45,26	100,00

Ket:

Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

(1 dan 2) menunjukkan perubahan nilai ekspor kondisi Des'18, Jan'18 dan Jan'19 dibawah 1 juta US\$ (ada pembulatan angka), bukan berarti tidak ada ekspor migas.

Nilai ekspor golongan Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26) pada periode Januari-Januari 2019 bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 53,04 persen (US\$ 138,18 juta). Sementara nilai ekspor golongan Kayu&Barang dari kayu (HS44) dan Non Migas lainnya mengalami peningkatan masing-masing sebesar US\$11,17 juta dan US\$7,23 juta.

C. Ekspor Menurut Negara Tujuan

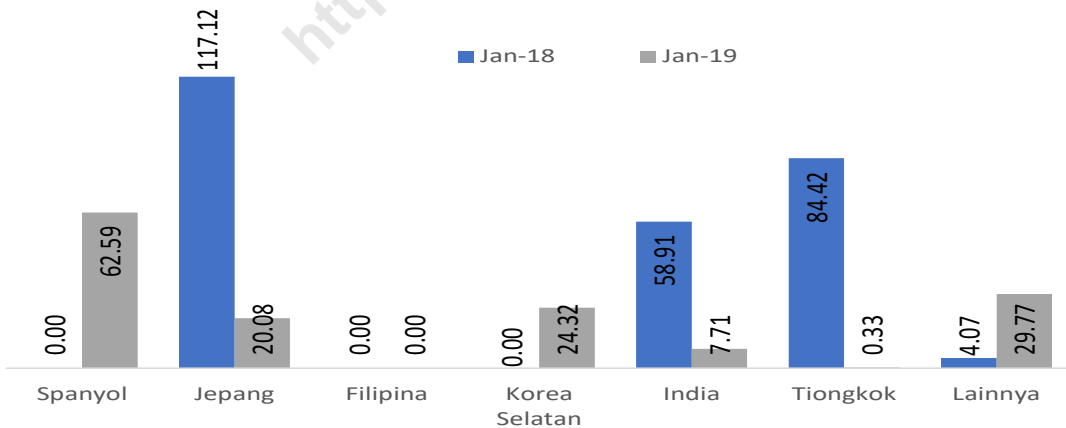
Ekspor ke enam negara utama pada Januari 2019 tercatat senilai US\$115,03 juta atau meningkat 34,45 persen dibanding nilainya pada Desember 2018 yang sebesar US\$85,55 juta. Ekspor ke negara lainnya senilai US\$29,77 juta atau meningkat sebesar US\$3,41 juta dibanding nilainya pada Desember 2018.

Ekspor ke negara lainnya senilai US\$3,41 juta atau menurun sebesar US\$137,69 juta dibanding nilainya pada November 2018.

Total impor kumulatif pada periode Januari-Desember 2018 adalah senilai US\$521,87 juta atau meningkat 16,85 persen bila dibandingkan total nilai impor kumulatif pada periode Januari-Desember 2017 senilai US\$446,63 juta.

Neraca perdagangan Papua pada Desember 2018 mengalami surplus sebesar US\$57,63 juta. Secara kumulatif, neraca perdagangan Papua pada Januari-Desember 2018 juga mengalami surplus sebesar US\$3.334,59 juta.

Gambar 18. Nilai Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari 2018/Januari 2019 (Juta US\$)



IMPOR



Tahukah anda??

“Pada Januari 2019, total impor Papua mencapai US\$26,41 juta.”

A. Impor Migas dan NonMigas

Impor Papua pada Januari 2019 tercatat senilai US\$26,41 juta yang terdiri dari impor migas senilai US\$8,63 juta dan impor non-migas senilai US\$17,78 juta. Dibandingkan Desember 2018, nilai impor Papua mengalami penurunan sebesar 16,52 persen yang dipengaruhi oleh menurunnya nilai impor nonmigas sebesar 23,44 persen (turun US\$ 5,44 juta). Sedangkan impor migas meningkat sebesar 2,59 persen (naik US\$ 0,22 juta).

Komoditi migas yang diimpor terdiri dari bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi. Sedangkan komoditi nonmigas yang memiliki nilai impor terbesar adalah barang-barang dari besi dan baja (HS73) yang memiliki nilai US\$ 6,77 juta atau sebesar 25,65 persen dari total nilai impor komoditi nonmigas.

Total impor Januari 2019 adalah senilai US\$26,41 juta atau lebih rendah 12,66 persen bila dibandingkan total nilai impor Januari 2018 senilai US\$31,63 juta. Neraca perdagangan Papua pada Januari 2019 mengalami surplus sebesar US\$118,39 juta. Jika dibandingkan Januari 2018, neraca perdagangan tahun ini lebih rendah 49,47 persen.

B. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Diji

Impor 10 golongan nonmigas utama pada Januari 2019 tercatat senilai US\$16,92 juta atau menurun 10,01 persen dibandingkan Desember 2018 sebesar US\$18,81 juta.

Tabel 5. Ringkasan Perkembangan Impor Provinsi Papua, Januari 2019

Uraian	Nilai CIF (Juta US\$)				% Perubahan Jan'19* thd Des'18	% Perubahan Jan'19* thd Jan'18	% Peran thd Total Impor Jan'19
	Des 2018	Jan 2019*	Jan 2018	Jan 2019*			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Total Impor	51,80	31,34	446,63	521,87	-39,51	16,85	100,00
Migas	19,22	8,41	129,94	180,16	-56,21	38,65	34,52
Non Migas	32,58	22,92	316,69	341,71	-29,65	7,90	65,48

Ket: Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

B. Impor Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit

Impor 10 golongan nonmigas utama pada Januari 2019 tercatat senilai US\$16,92 juta atau menurun 10,01 persen dibandingkan Desember 2018 sebesar US\$18,81 juta.

Golongan barang nonmigas utama yang memiliki nilai impor terbesar adalah Barang-barang dari Besi dan Baja (HS73) sebesar US\$6,77 juta, golongan Mesin-mesi/Pesawat Mekanik (HS84) sebesar US\$3,42 juta dan Barang-barang dari karet (HS40) sebesar US\$2,19 juta. Sedangkan, nilai impor golongan nonmigas lainnya mengalami penurunan dari US\$4,41 juta menjadi U\$0,85 juta.

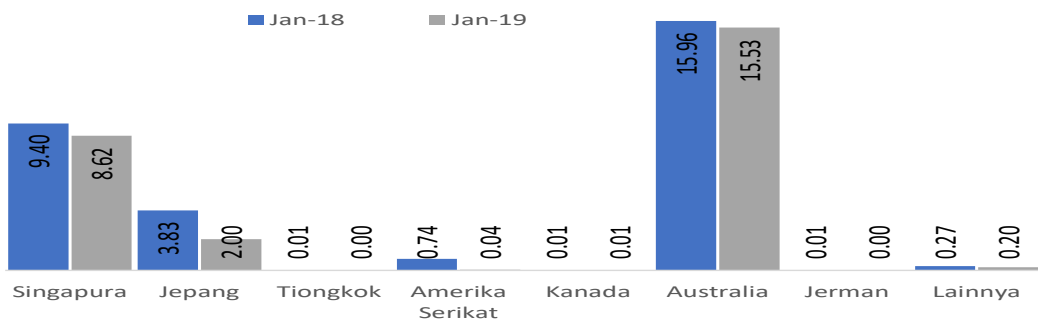
Nilai impor 10 golongan nonmigas utama pada Januari 2019 mengalami penurunan sebesar 9,25 persen yaitu dari US\$18,65 juta menjadi US\$16,92 juta. Penurunan tersebut didorong oleh berkurangnya nilai impor golongan Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84) sebesar US\$2,93 juta (turun 46,11 persen) dan golongan Karet dan Barang dari Karet (HS40) sebesar US\$1,97

juta (turun 47,31 persen). Sementara total nilai impor kumulatif golongan nonmigas lainnya turun 61,07 persen atau berkurang US\$1,34 juta. Impor 10 golongan nonmigas utama memberikan andil 64,08 persen terhadap total impor kumulatif Januari 2019.

C. Impor Menurut Negara Asal

Nilai impor dari tujuh negara utama pada Januari 2019 tercatat sebesar US\$6,20 juta atau meningkat 17,42 persen dibandingkan nilainya pada Desember 2018 sebesar US\$22,32 juta. Impor dari negara lainnya mengalami penurunan senilai US\$9,11 juta. Tiga negara pemasok barang terbesar ke Papua pada Januari 2019 adalah Australia dengan impor senilai US\$15,53 juta (58,81 persen), Singapura US\$8,62 juta (32,65 persen), dan Jepang sebesar US\$2,00 juta (7,57 persen).

Gambar 19. Nilai Impor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan, Januari 2018/Januari 2019



NILAI TUKAR PETANI (NTP)



Tahukah anda??

“Pada bulan Januari 2019, NTP Papua sebesar 990,37”

A. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani (It) terhadap harga dibayar petani (Ib) dalam persentase merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan.

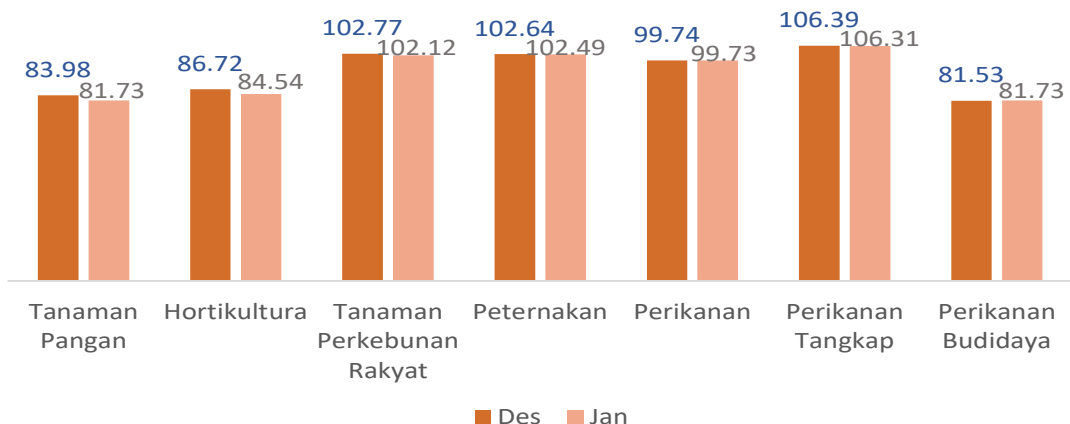
NTP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

NTP Papua Januari 2019 mengalami penurunan dibandingkan NTP Desember 2018 dengan nilai indeks NTP sebesar 90,37

Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, kenaikan indeks NTP disebabkan oleh perubahan indeks harga diterima petani sebesar 0,96 persen, lebih besar dari perubahan indeks harga dibayar petani sebesar 0,63 persen.

Dilihat menurut subsektornya, perubahan angka indeks yang terjadi yaitu subsektor tanaman pangan turun 2,68 persen, hortikultura turun 2,52 persen, subsektor tanaman perkebunan rakyat turun 0,64 persen, subsektor peternakan turun 0,15 persen dan subsektor perikanan cenderung stagnan.

Gambar 20. Perkembangan NTP Papua Menurut Subsektor Desember 2018 -Januari 2019(2012=100)



Indeks harga diterima petani (It) menggambarkan perubahan harga komoditas yang dihasilkan petani.

Pada Januari 2019, It Papua sebesar 120,54 atau turun 0,96 persen dibandingkan It Desember 2018. Penurunan It terjadi karena It Subsektor Holtikultura turun sebesar 1,8 persen, subsektor Tanaman Pangan turun 2,10 persen. Sedangkan subsektor Peternakan naik 0,41 persen, subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,07 persen, dan subsektor Perikanan naik 0,49 persen.

Fluktuasi harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat perdesaan, khususnya petani baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk keperluan produksi hasil pertanian dapat diketahui melalui indeks harga dibayar petani.

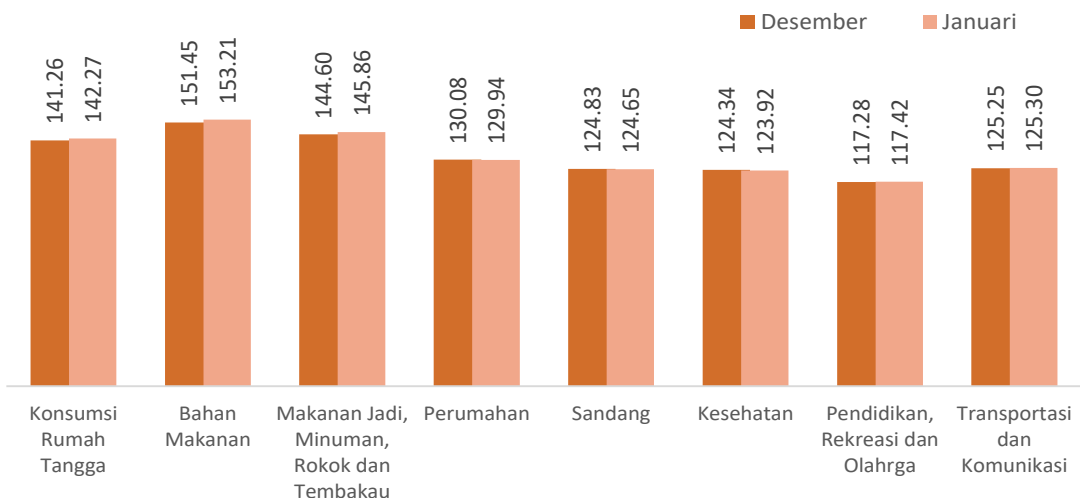
Pada Januari 2019, Ib Papua sebesar 133,38 atau 0,63 persen lebih tinggi dibandingkan Ib bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 132,55. Peningkatan Ib gabungan tersebut didorong oleh naiknya Ib

pada seluruh subsektor dimana subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat naik 0,71 persen; subsektor Holtikultura naik 0,74 persen; subsektor Perikanan naik 0,50 persen; subsektor Tanaman Pangan naik 0,60 persen; dan subsektor Peternakan naik 0,56 persen.

B. Perkembangan Indeks Harga Konsumsi Perdesaan

Pada Januari 2019, wilayah perdesaan Papua mengalami inflasi sebesar 0,71 persen yang dipicu oleh naiknya indeks harga pada mayoritas kelompok pengeluaran rumah tangga. Inflasi pedesaan di Provinsi Papua pada Januari 2019 lebih tinggi dibandingkan inflasi pedesaan nasional sebesar 0,26 persen. Dari 33 provinsi tercatat 25 provinsi mengalami inflasi pedesaan dan 8 provinsi deflasi. Inflasi pedesaan tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan sebesar 1,25 persen dan deflasi terbesar tercatat di Gorontalo sebesar -0,61 persen.

Gambar 21. Perkembangan Indeks Konsumsi Rumah Tangga Menurut Subkelompok Pengeluaran Provinsi Papua, Desember 2018-Januari 2019(2012=100)



ANGKUTAN LAUT



Tahukah anda??

“Jumlah penumpang berangkat dan datang dengan angkutan laut pada Desember 2018 masing-masing sebanyak 28.151 orang dan 15.345 orang

A. Penumpang Berangkat dan Datang

Jumlah penumpang yang berangkat menggunakan angkutan laut pada Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 210,58 persen, yaitu dari 9.064 orang pada November 2018 menjadi 28.151 orang. Sedangkan jumlah penumpang yang datang tercatat sebanyak 15.345 orang atau naik 72,67 persen bila dibandingkan November 2018.

Dilihat menurut pelabuhan, jumlah penumpang yang berangkat melalui Pelabuhan Jayapura dan Merauke masing-masing 22.614 orang dan 5.537 orang. Sedangkan jumlah penumpang yang datang melalui Pelabuhan Jayapura dan Merauke masing-masing sebesar 12.484 orang dan 2.861 orang.

Secara kumulatif, total penumpang yang berangkat dengan angkutan laut pada Januari-Desember 2018 mengalami peningkatan 6,32 persen bila dibandingkan dengan totalnya pada Januari-Desember 2017. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kumulatif penumpang di Pelabuhan Jayapura sebesar 6,26 persen dan bertambahnya penumpang berangkat di Pelabuhan Merauke sebesar 8,59 persen.

Total penumpang yang datang dengan angkutan laut pada Januari-Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar 6,32 persen dibandingkan dengan totalnya pada Januari-Oktober 2017.

Tabel 6. Perkembangan Penumpang Berangkat dan Datang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Desember 2018

Pelabuhan	Jumlah Penumpang Berangkat			Jumlah Penumpang Datang		
	Nov'18 (Orang)	Des'18 (Orang)	% Perubahan Des'18 thd Nov'18	Nov'18 (Orang)	Des'18 (Orang)	% Perubahan Des'18 thd Nov'18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	6 859	22 164	229,70	7 130	12 484	75,09
Merauke	2 205	5 537	151,11	1 757	2 861	62,83
Total	9 064	28 151	210,58	8 887	15 345	72,67

Ket: Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

B. Bongkar dan Muat Barang

Volume barang yang dimuat pada November 2018 tercatat sebesar 11.814 ton atau mengalami penurunan -9,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Dilihat menurut pelabuhan, volume muat barang di Pelabuhan Jayapura, tercatat sebesar 15.803 ton atau naik 84,38 persen. Sedangkan di Pelabuhan Merauke, volume muat barang tercatat sebesar 2.033 ton atau turun 37,31 persen. Secara total, volume barang yang dimuat pada Januari-Desember 2018 meningkat 50,97 persen (260.826 ton) bila dibandingkan dengan nilainya pada Januari-Desember 2017. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya volume barang yang dimuat di Pelabuhan Jayapura sebesar 16,37 persen dan di Pelabuhan Merauke sebesar 19,96 persen.

Volume barang yang dibongkar pada Desember 2018 sebesar 133.304 ton atau turun 3,02 persen dibanding bulan sebelumnya. Di Pelabuhan Jayapura, volume bongkar barang tercatat sebesar 97.583 ton sementara di Pelabuhan Merauke, volume bongkar barang tercatat sebesar 35.721 ton. Total volume barang yang dibongkar pada Januari-Desember 2018 mencapai 1.402.438 ton atau meningkat 21,80 persen bila dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.151.425 ton.

Tabel 7. Perkembangan Bongkar dan Muat Barang Angkutan Laut Dalam Negeri Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke, Desember 2018

Pelabuhan	Volume Bongkar Barang			Volume Muat Barang		
	Nov'18 (ton)	Des'18 (ton)	% Perubahan Des'18 thd Nov'18	Nov'18 (ton)	Des'18 (ton)	% Perubahan Des'18 thd Nov'18
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jayapura	98 595	97 853	-1.03	8 571	15 803	84.38
Merauke	38 857	35 721	-8.07	3 243	2 033	-37.31
Total	137 452	133 304	-3.02	11 814	17 836	50.97

Ket: Tanda (*) menunjukkan Angka Sementara

INDUSTRI MANUFAKTUR



Tahukah anda??

“Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang di triwulan IV-2018 tumbuh negative 13,53 persen”

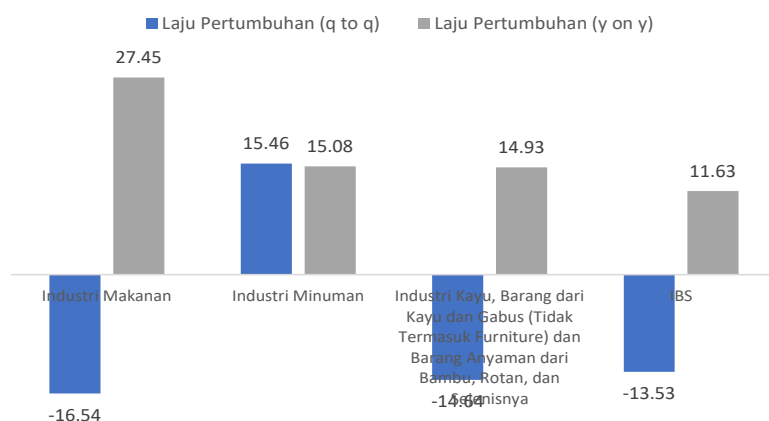
A. A. Industri Manufaktur Besar Dan Sedang Triwulan IV Tahun 2018

Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (q-to-q) pada Triwulan IV-2018 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,53 persen dari Triwulan III-2018. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibanding dengan angka pertumbuhan secara nasional yang tumbuh sebesar 0,90 persen. Penurunan angka pertumbuhan ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi dari Industri Makanan (KBLI 10), khususnya Crude Palm Oil (minyak kelapa sawit). Hal ini dikarenakan terjadi kerusakan mesin perusahaan pada dua bulan terakhir sehingga proses produksi menjadi terhenti. Selain itu, Industri Kayu, Barang dari kayu (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, rotan dan

(Sejenisnya (KBLI 16) juga mengalami penurunan produksi yang disebabkan perusahaan kesulitan memperoleh ijin untuk memperluas lahan HPH sehingga perusahaan harus melakukan efisiensi produksi. Kondisi berbeda terjadi pada produksi Industri Minuman (KBLI 11). Komoditi tersebut selama Triwulan IV-2018 mengalami pertumbuhan positif dibandingkan Triwulan III-2018. Fenomena ini disebabkan karena tingginya permintaan masyarakat menjelang perayaan natal dan tahun baru.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi Triwulan IV-2017, pertumbuhan Produksi IBS (y-on-y) Provinsi Papua selama Triwulan IV-2018 juga tumbuh sebesar 11,63 persen.

Gambar 22. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2018 (persen)



Catatan:

Dari beberapa jenis IBS yang ada di Papua, hanya Industri Makanan (KBLI 10) dan Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (KBLI 16) saja yang dapat dipublikasikan. Hal ini disebabkan karena tidak semua jenis industri manufaktur besar dan sedang memenuhi syarat penghitungan pertumbuhan produksi industri, karena jumlah perusahaannya yang sangat sedikit.

B. B. Industri Manufaktur Mikro Dan Kecil (IMK) Triwulan IV Tahun 2018

Pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil di Papua pada Triwulan IV-2018 secara (q-to-q) tumbuh sebesar 6,24 persen dari Triwulan III-2018 dan berada di atas pertumbuhan nasional yang tumbuh sebesar 1,24 persen

Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi beberapa komoditi yang memiliki share besar yaitu: Industri Makanan (KBLI 10). Fenomena ini disebabkan meningkatnya permintaan menjelang perayaan natal dan tahun baru. Selain itu terjadi peningkatan produksi pada industri barang galian bukan logam, industri pakaian jadi, industri minuman serta industri

Furniture yang turut memberikan peran pada peningkatan indeks Industri Manufaktur Mikro dan Kecil di Triwulan IV-2018.

Secara y-o-y, Provinsi Papua Triwulan IV-2018 tumbuh negatif, sebesar 5,53 persen dibawah pertumbuhan produksi nasional yang tumbuh positif sebesar 5,38 persen. Pertumbuhan tersebut disebabkan terbatasnya bahan baku pada Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya (KBLI16). Selain itu mayoritas aktivitas pada kegiatan industry tersebut cenderung berkurang pada triwulan ini karena banyaknya aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat menjelang perayaan natal dan tahun baru.

Tabel 8. Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Menurut KBLI Provinsi Papua Triwulan IV-2018 (persen)

Kode KBLI	Jenis Industri	Pertumbuhan	
		q to q	y-on-y
10	Industri Makanan	3,01	-2,95
11	Industri Minuman	9,33	-9,59
13	Industri Tekstil	41,42	8,04
14	Industri Pakaian Jadi	22,20	-47,60
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1,79	79,34
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-5,88	-13,49
18	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	27,01	-0,15
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	2,17	-1,61
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1,84	1,84
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	-9,93	-30,25
31	Industri Furnitur	23,81	20,88
32	Industri Pengolahan Lainnya	5,98	-38,48

INDEKS TENDENSI KONSUMEN (ITK)



Tahukah anda??

“Kondisi ekonomi konsumen di Triwulan IV2018 sebesar 119,51”

A. Indeks Tendensi Konsumen Triwulan IV Tahun 2018

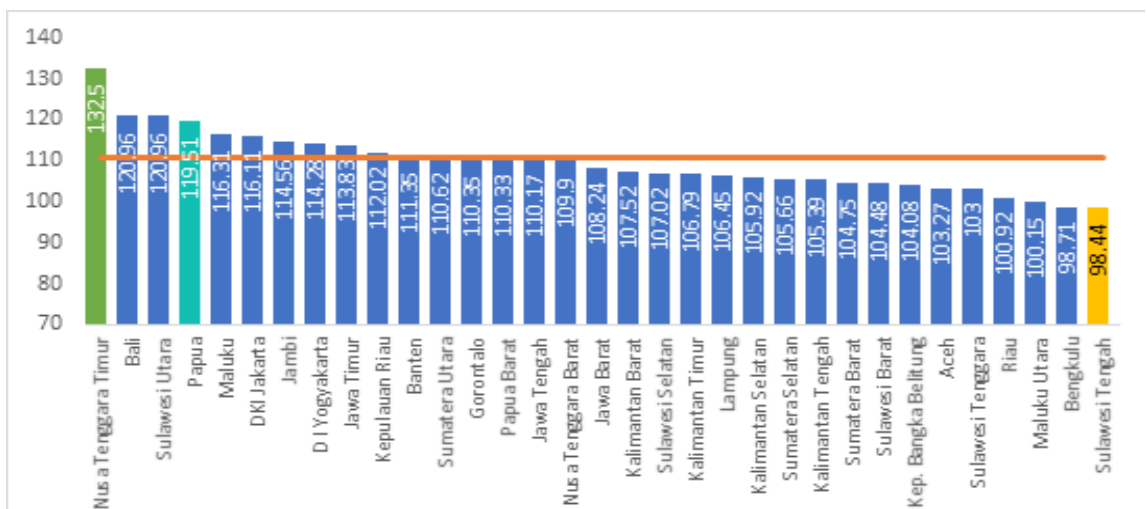
Indeks Tendensi Konsumen (ITK) Provinsi Papua di triwulan IV-2018 (Oktober-Desember 2018) sebesar 119,51. Angka ITK yang berada di atas 100 mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi konsumen meningkat dibandingkan kondisinya di triwulan III-2018 (Juli-September 2018) dengan nilai ITK Triwulan III-2018 sebesar 96,42.

Meningkatnya kondisi ekonomi konsumen Papua di triwulan keempat ini disebabkan oleh meningkatnya seluruh variabel pembentuk komponen ITK. Variabel

tersebut adalah pendapatan rumah tangga kini sebesar 126,19, pengaruh inflasi terhadap total konsumsi rumah tangga sebesar 103,92, dan meningkatnya volume konsumsi barang/jasa sebesar 123,36. Peningkatan tersebut dipicu adanya perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua memberikan kebijakan libur tambahan untuk memperingati Natal dan Tahun Baru yang juga bertepatan dengan libur anak sekolah.

Di tingkat nasional, kondisi ekonomi konsumen di triwulan IV-2018 mengalami peningkatan dibandingkan kondisi di triwulan sebelumnya dengan indeks sebesar 110,54. Naiknya kondisi ekonomi

Gambar 23. ITK Triwulan IV Tahun 2018 Tingkat Nasional dan Provinsi



konsumen di tingkat nasional karena membaiknya kondisi ekonomi konsumen pada sebagian besar provinsi di Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat memiliki ITK tertinggi yaitu sebesar 132,50. Sedangkan ITK terendah di Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai indeks 98,44

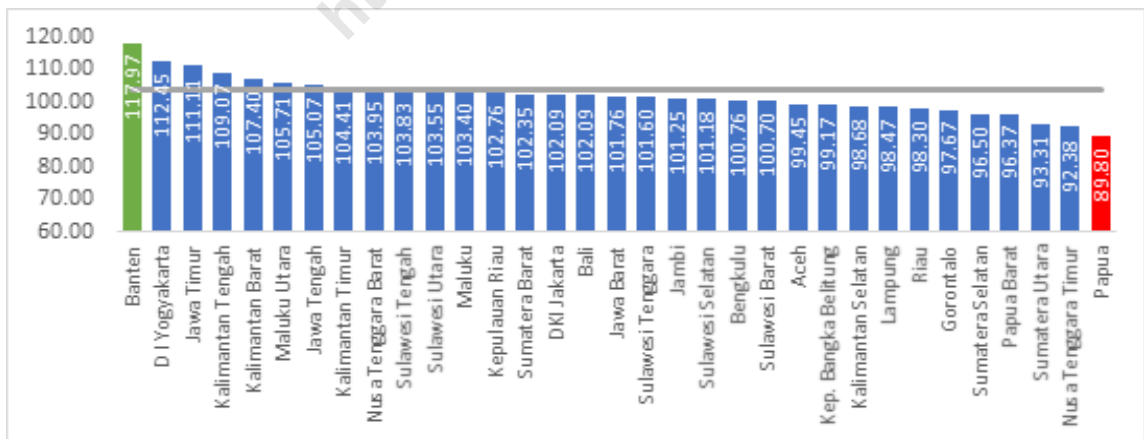
Peningkatan tersebut dipicu oleh adanya peningkatan perkiraan Pendapatan Mendatang meningkat dengan tingkat optimisme yang lebih tinggi dibandingkan pada triwulan IV-2018 (nilai indeks 113,04).

B. Perkiraan Indeks Tendensi Konsumen Triwulan I Tahun 2019

Perkiraan ITK triwulan I-2019 Provinsi Papua diperkirakan sebesar 89,80 yang berarti kondisi ekonomi konsumen menurun dibandingkan kondisinya di triwulan IV-2018. Untuk triwulan I-2019 (Januari-Maret 2019), angka ITK nasional diperkirakan sebesar 104,30 yang berarti kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat dibandingkan kondisinya di triwulan IV-2018.

Selain itu, meningkatnya kondisi ekonomi konsumen di tingkat nasional disebabkan meningkatnya perkiraan kondisi ekonomi konsumen pada sebagian besar provinsi di Indonesia, meskipun ada beberapa provinsi yang perkiraan ITK triwulan IV-2018 menurun. Perkiraan ITK tertinggi terjadi di Provinsi Banten yang mencapai 117,97; sementara perkiraan ITK terendah terjadi di Provinsi Papua sebesar 89,80.

Gambar 24. Perkiraan ITK Triwulan I Tahun 2019 Tingkat Nasional dan Provinsi



<https://papua.bps.go.id>



PERTANIAN

TANAMAN PANGAN



Tahukah anda??

“Produksi Padi tahun 2018 Provinsi Papua mencapai 130,718 ton gabah kering giling”

Penghitungan angka produksi Padi tahun 2018 dilakukan dengan Metode Kerangka Sampel Area(KSA). Dengan Metode tersebut dapat dihitung luas panen, dan potensi luas panen.

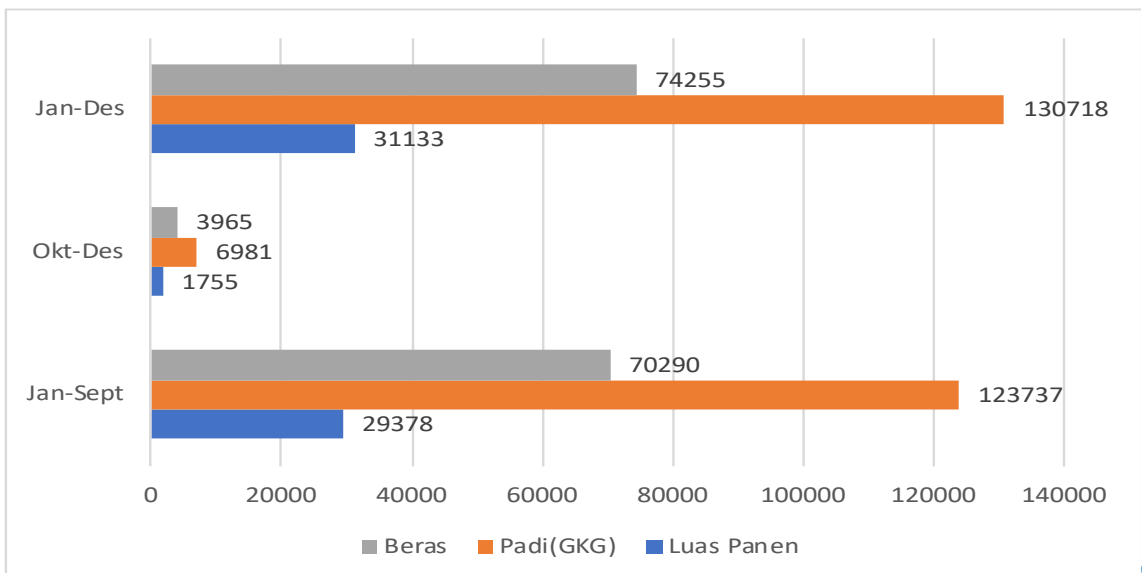
Berdasarkan hasil survei KSA, luas panen padi di Provinsi Papua periode Januari-September 2018 sebesar 29.378 hektar. Sedangkan potensi luas panen bulan Oktober hingga Desember mencapai 1.755 hektar sehingga secara total luas panen di tahun 2018 mencapai 31.133 hektar.

Produksi Padi Provinsi Papua tahun 2018 mencapai 130.718 ton gabah kering giling (GKG), yang terdiri atas Produksi Padi sejak Januari hingga September 2018 sebesar 123.737 hektar.

Sementara potensi produksi padi 3 bulan terakhir (Oktober-Desember 2018) sebesar 6.981 ton.

Produksi Padi di Provinsi Papua dari Januari hingga September 2018 jika dikonversi menjadi beras dengan konversi GKG ke beras tahun 2018 setara 70.290 ton beras. Sementara itu, potensi produksi pada bulan Oktober hingga Desember 2018 diperkirakan sebesar 3.965 ton. Sehingga secara total produksi beras tahun 2018 adalah sebesar 74.255 ton.

Gambar 25. Produksi Tanaman Pangan Provinsi Papua Tahun 2018





<https://papua.bps.go.id>

**INFORMASI
LAINNYA**

INFORMASI LAINNYA

A. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan indeks spasial yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan kota acuan, dimana Kota Surabaya sebagai kota acuan.

IKK Provinsi Papua pada tahun 2017 merupakan IKK tertinggi di Indonesia dengan nilai IKK sebesar 229,82. Sementara IKK tertinggi di Provinsi Papua adalah Kabupaten Puncak yaitu sebesar 469,96. Angka tersebut menggambarkan Kabupaten Puncak memiliki kondisi geografis yang paling sulit diantara kabupaten/kota lain di Provinsi Papua, sedangkan IKK terendah adalah Kabupaten Jayapura dengan nilai IKK sebesar 137,54.

B. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Aspek demokrasi yang dihitung dalam penyusunan IDI adalah Kebebasan Sipil (Civil Liberties), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

IDI Provinsi Papua tahun 2017 adalah 61,34 naik 0,32 poin dibandingkan tahun 2016. Kondisi ini menempatkan kinerja demokrasi Papua pada level 'sedang'. Kenaikan angka yang merupakan indeks

komposit tersebut dipengaruhi oleh kenaikan di dua aspek demokrasi. Kenaikan terbesar terjadi pada aspek lembaga demokrasi yang mencapai 3,46 poin dari 53,45 pada tahun 2016 menjadi 56,91 pada tahun 2017. Disusul aspek hak-hak politik yang naik 2,58 poin dari 50,87 pada tahun 2015 menjadi 53,45 pada tahun 2016. Aspek hak-hak politik naik 1,03 poin dari 41,13 pada tahun 2016 menjadi 42,16 tahun 2017.

C. Gini Ratio

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Secara umum, gini ratio di Papua selama kurun waktu 2010-2018 berfluktuasi. Tahun 2010, gini ratio Papua tercatat sebesar 0,414 dan meningkat menjadi 0,419 pada Maret 2011. Pada periode Maret 2012 hingga September 2014, nilai Gini Ratio berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada September 2014 yaitu sebesar 0,459.

Pada Maret 2015 Gini Ratio mulai turun menjadi 0,421 dan terus menurun hingga mencapai angka 0,384 pada September 2018.



LAMPIRAN

<https://papua.bps.go.id>

PENJELASAN TEKNIS

- ❖ Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 2000, sejak tahun 2015 menggunakan tahun dasar 2010 berbasis SNA. Penghitungan PDRB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2010.
- ❖ PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun untuk melihat pergeseran ekonomi.
- ❖ Penghitungan Indeks Harga Konsumen saat ini menggunakan tahun dasar 2012=100 sehingga sejak tahun 2014, data IHK mencakup 82 kota di seluruh Indonesia. Di Papua kota IHK diwakili oleh Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke.
- ❖ Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih.
- ❖ Pekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan paling sedikit satu jam tidak terputus dalam seminggu lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
- ❖ Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif terlibat secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Indikator Makro Provinsi Papua Tahun 2014 - 2018

Jenis Indikator		2014	2015	2016	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Indikator Sosial						
Kependudukan dan Kemiskinan	Jumlah penduduk (jiwa)	3.091.047	3.149.375	3.207.444	3.265.444	3.322.526
	IPM	56,75	57,25	58,05	59,09	n.a
	1. AHH saat lahir (tahun)	64,84	65,09	65,12	65,14	n.a
	2. Harapan lama sekolah (tahun)	9,94	9,95	10,23	10,54	n.a
	3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	5,76	5,99	6,15	6,27	n.a
	4. Pengeluaran perkapita disesuaikan (ribu Rp)	6.416	6.469	6.637	6.996	n.a
	Angkatan kerja (jiwa) ¹⁾	1.689.030	1.709.668	1.743.160	1.753.858	1.835.963
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) ¹⁾	80,54	79,26	78,77	77,3	79,11
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ¹⁾	3,48	3,72	2,97	3,96	3,20
	Persentase penduduk miskin (persen)	30,05	28,17	28,54	27,62	27,74 ²⁾
	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan) ¹⁾	355.380	402.031	427.176	457.541	499.643
	Distribusi pendapatan					
	40 % berpendapatan rendah	16,47	15,41	14,36	14,71	15,55
	40 % berpendapatan sedang	35,6	36,36	42,38	41,13	41,03
	20 % berpendapatan tinggi	47,92	48,24	43,26	44,16	43,42
	Gini Ratio	0,41	0,39	0,397	0,397	0,384
Indikator Ekonomi						
Perkembangan Ekonomi	Ekspor-Impor					
	Ekspor (Juta US\$)	1.529,67	2.007,34	2.004,04	2.454,59	3.856,46
	<i>Januari 2019</i>					144,80
	Impor (Juta US\$)	1.376,50	1.831,81	1.907,96	446,51	521,87
	<i>Januari 2019</i>					26,41
	Neraca Perdagangan (Juta US\$)	153,17	175,53	96,08	2.008,08	3.334,59
	<i>Januari 2019</i>					118,39
	Inflasi					
	Inflasi Kota Jayapura	7,98	2,79	4,13	2,41	0,26 ³⁾
	Inflasi Kabupaten Merauke	12,31	5,76	0,82	1,25	-0,01 ³⁾
	Pertumbuhan Ekonomi (persen)					
	Dengan Tambang (Persen)	3,81	7,97	9,14	4,64	7,33 ⁴⁾
	Tanpa Tambang (Persen)	8,81	8,11	6,44	5,18	5,04 ⁴⁾
	PDRB Berlaku					
	Dengan Tambang (miliar Rp)	133.329,981	150.307,28	173.208,86	188.945,17	210.659,81 ⁴⁾
	Tanpa Tambang (juta Rp)	87.256,179	101.880,49	114.183,51	122.464,78	133.313,76 ⁴⁾
PDRB Harga Konstan						
Dengan Tambang (juta Rp)	121.391,234	130.311,60	142.224,93	148.822,52	159.728,93 ⁴⁾	
Tanpa Tambang (juta Rp)	71.512,227	77.400,24	82.384,56	86.648,46	91.016,63 ⁴⁾	

¹⁾ Keadaan Agustus 2018

²⁾ Keadaan Maret 2018

³⁾ Keadaan Januari 2019

⁴⁾ Keadaan Februari (Tahunan 2018)

**Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se Papua
Tahun 2012-2017**

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Merauke	66,28	66,88	67,33	67,75	68,09	68,61
2	Jayawijaya	52,27	52,94	53,37	54,18	54,96	55,91
3	Jayapura	68,85	69,21	69,55	70,04	70,50	70,91
4	Nabire	65,28	65,45	66,25	66,49	66,64	67,11
5	KepulauanYapen	64,11	64,34	64,89	65,28	65,55	66,01
6	Biak Numfor	69,05	69,35	70,32	70,85	71,13	71,51
7	Paniai	53,34	53,70	53,93	54,20	54,34	54,91
8	Puncak Jaya	41,85	43,36	44,32	44,87	45,49	46,91
9	Mimika	68,95	69,50	70,40	70,89	71,64	72,41
10	Boven Digoel	57,45	57,96	58,21	59,02	59,35	60,91
11	Mappi	55,09	55,51	55,74	56,11	56,54	57,91
12	Asmat	45,08	45,54	45,91	46,62	47,31	48,41
13	Yahukimo	43,82	45,63	46,36	46,63	47,13	47,91
14	Pegunungan Bintang	37,82	38,94	39,68	40,91	41,90	43,91
15	Tolikara	44,86	45,68	46,16	46,38	47,11	47,81
16	Sarmi	59,03	59,51	60,48	60,99	61,27	62,91
17	Keerom	61,13	62,49	62,73	63,43	64,10	64,91
18	Waropen	61,32	61,68	61,97	62,35	63,10	64,01
19	Supiori	58,86	59,40	59,70	60,09	60,59	61,91
20	Mamberamo Raya	46,62	47,28	47,88	48,29	49,00	50,91
21	Nduga	23,07	24,42	25,38	25,47	26,56	27,81
22	Lanny Jaya	42,53	43,05	43,28	44,18	45,16	46,41
23	Mamberamo Tengah	41,39	42,43	43,19	43,55	44,15	45,91
24	Yalimo	41,84	43,33	44,21	44,32	44,95	46,91
25	Puncak	36,85	37,73	38,05	39,41	39,96	41,01
26	Dogiyai	50,59	51,46	52,25	52,78	53,32	54,01
27	Intan Jaya	41,89	42,69	43,51	44,35	44,82	45,91
28	Deiyai	46,94	47,74	48,12	48,28	48,50	49,01
29	Kota Jayapura	77,25	77,46	77,86	78,05	78,56	79,91
	Provinsi Papua	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05	59,91

**Nilai Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten/Kota se-Papua
Tahun 2014-2018**

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Merauke	247,59	195,66	179,69	168,31	156,56
2	Jayawijaya	254,25	269,20	282,04	290,37	311,96
3	Jayapura	144,52	131,25	128,93	137,54	125,98
4	Nabire	164,59	148,86	152,00	147,53	150,45
5	KepulauanYapen	158,31	145,03	144,48	144,96	142,25
6	Biak Numfor	153,17	167,96	153,00	142,21	134,88
7	Paniai	214,95	227,34	215,29	225,31	250,29
8	Puncak Jaya	413,38	409,55	423,41	436,94	464,12
9	Mimika	193,34	173,41	156,16	148,00	150,54
10	Boven Digoel	180,93	196,67	181,24	171,29	161,96
11	Mappi	219,06	204,81	190,36	180,53	167,70
12	Asmat	226,59	207,30	220,75	231,32	213,94
13	Yahukimo	197,53	216,76	229,55	242,78	220,02
14	Pegunungan Bintang	386,29	367,19	379,97	391,44	368,02
15	Tolikara	385,95	366,04	351,04	351,23	377,27
16	Sarmi	242,60	219,74	200,31	188,91	163,77
17	Keerom	176,76	170,34	157,21	160,94	147,62
18	Waropen	152,10	166,40	154,47	163,01	186,5
19	Supiori	185,87	176,18	160,77	150,79	149,02
20	Mamberamo Raya	187,03	194,18	182,07	192,76	208,29
21	Nduga	321,30	342,18	326,15	318,34	325,36
22	Lanny Jaya	357,07	337,46	325,43	332,92	337,65
23	Mamberamo Tengah	399,62	379,92	392,84	403,74	429,33
24	Yalimo	388,65	369,21	352,28	343,90	370,50
25	Puncak	462,84	449,72	454,67	469,96	498,98
26	Dogiyai	235,19	220,72	204,28	209,49	236,53
27	Intan Jaya	431,26	424,02	397,57	412,52	441,38
28	Deiyai	222,61	221,29	218,81	229,29	253,83
29	Kota Jayapura	172,80	158,69	150,07	147,06	132,86
	Provinsi Papua	188,70	191,86	247,91	239,98	227,90

**Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota se Papua
Tahun 2012-2017**

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Merauke	66,28	66,88	67,33	67,75	68,09	68,64
2	Jayawijaya	52,27	52,94	53,37	54,18	54,96	55,99
3	Jayapura	68,85	69,21	69,55	70,04	70,50	70,97
4	Nabire	65,28	65,45	66,25	66,49	66,64	67,11
5	KepulauanYapen	64,11	64,34	64,89	65,28	65,55	66,07
6	Biak Numfor	69,05	69,35	70,32	70,85	71,13	71,56
7	Paniai	53,34	53,70	53,93	54,20	54,34	54,91
8	Puncak Jaya	41,85	43,36	44,32	44,87	45,49	46,57
9	Mimika	68,95	69,50	70,40	70,89	71,64	72,42
10	Boven Digoel	57,45	57,96	58,21	59,02	59,35	60,14
11	Mappi	55,09	55,51	55,74	56,11	56,54	57,10
12	Asmat	45,08	45,54	45,91	46,62	47,31	48,49
13	Yahukimo	43,82	45,63	46,36	46,63	47,13	47,95
14	Pegunungan Bintang	37,82	38,94	39,68	40,91	41,90	43,24
15	Tolikara	44,86	45,68	46,16	46,38	47,11	47,89
16	Sarmi	59,03	59,51	60,48	60,99	61,27	62,31
17	Keerom	61,13	62,49	62,73	63,43	64,10	64,99
18	Waropen	61,32	61,68	61,97	62,35	63,10	64,08
19	Supiori	58,86	59,40	59,70	60,09	60,59	61,23
20	Mamberamo Raya	46,62	47,28	47,88	48,29	49,00	50,25
21	Nduga	23,07	24,42	25,38	25,47	26,56	27,87
22	Lanny Jaya	42,53	43,05	43,28	44,18	45,16	46,49
23	Mamberamo Tengah	41,39	42,43	43,19	43,55	44,15	45,50
24	Yalimo	41,84	43,33	44,21	44,32	44,95	46,19
25	Puncak	36,85	37,73	38,05	39,41	39,96	41,06
26	Dogiyai	50,59	51,46	52,25	52,78	53,32	54,04
27	Intan Jaya	41,89	42,69	43,51	44,35	44,82	45,68
28	Deiyai	46,94	47,74	48,12	48,28	48,50	49,07
29	Kota Jayapura	77,25	77,46	77,86	78,05	78,56	79,23
	Provinsi Papua	55,55	56,25	56,75	57,25	58,05	59,09

**PDRB Perkapita (Dengan Pertambahan dan Penggalian) Kabupaten/Kota se-Papua
Tahun 2014-2017 (Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Merauke	41.682.788,19	47.811.023,59	53.042.931,75	57.702.338,50
2	Jayawijaya	23.298.944,81	26.251.551,45	29.205.421,14	31.968.046,04
3	Jayapura	70.782.935,31	82.174.652,54	92.994.178,45	101.960.297,82
4	Nabire	48.694.835,36	54.980.416,67	60.626.552,45	65.980.831,40
5	KepulauanYapen	29.640.003,53	32.962.336,88	35.946.633,63	37.778.149,39
6	Biak Numfor	28.979.518,29	32.522.006,57	35.627.436,51	34.503.014,65
7	Paniai	15.587.041,29	17.759.824,71	20.011.813,39	21.812.767,82
8	Puncak Jaya	7.973.013,73	8.908.036,01	9.384.126,04	9.767.921,44
9	Mimika	252.509.984,45	268.986.190,59	334.131.437,02	371.955.614,81
10	Boven Digoel	51.994.489,04	56.274.175,87	60.698.848,27	64.644.235,74
11	Mappi	18.783.580,12	21.076.162,88	23.201.955,56	25.622.277,26
12	Asmat	17.128.694,12	18.500.627,90	20.210.355,81	21.860.082,85
13	Yahukimo	8.412.535,15	9.373.344,49	10.188.805,66	11.213.689,10
14	Pegunungan Bintang	16.709.194,45	18.274.902,13	20.283.226,38	22.048.560,76
15	Tolikara	7.985.069,97	8.593.098,44	9.225.041,54	9.860.721,71
16	Sarmi	44.750.206,94	50.008.966,04	54.915.065,17	60.110.874,41
17	Keerom	35.470.317,66	39.483.966,54	43.121.778,24	46.134.878,74
18	Waropen	44.680.526,97	49.936.092,92	55.597.069,00	59.793.280,62
19	Supiori	40.530.669,05	42.162.729,85	44.922.394,76	46.754.638,83
20	Mamberamo Raya	42.462.072,18	48.078.905,95	54.490.317,09	59.777.428,85
21	Nduga	7.595.145,21	8.580.085,51	9.474.745,01	10.504.868,68
22	Lanny Jaya	6.371.750,19	7.154.441,68	7.912.643,03	8.661.891,48
23	Mamberamo Tengah	15.715.066,51	17.391.828,66	19.265.806,98	20.823.184,67
24	Yalimo	12.062.007,98	13.710.592,18	15.317.323,67	16.559.563,65
25	Puncak	7.548.918,01	8.704.367,30	9.757.590,93	10.649.450,33
26	Dogiyai	8.662.993,94	9.710.998,26	10.680.684,94	11.566.519,52
27	Intan Jaya	16.690.083,36	19.428.069,39	21.585.765,25	22.494.347,80
28	Deiyai	11.138.854,98	13.274.000,97	15.053.256,09	16.004.977,69
29	Kota Jayapura	74.573.487,10	81.574.706,76	90.123.411,46	95.973.727,18
	Provinsi Papua	43.134.245,84	47.726.067,65	54.732.737,03	58.684.089,67

*angka sementara

**angka sangat sementara

<https://papua.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112
Telp: (Telp. (0967) 5165 999, 5165 107
Homepage: <http://papua.bps.go.id>
E-mail: bps9400@bps.go.id



9 772477 447008